

**PERLAKUAN PAJAK ATAS KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN POTENSI PENINGKATAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK**

**(Studi pada kasus Tindak Pidana korupsi Reklamasi Pantai Teluk
Jakarta dengan Tersangka M. Sanusi)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ARIS TIAN TO

NIM 115030400111080



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

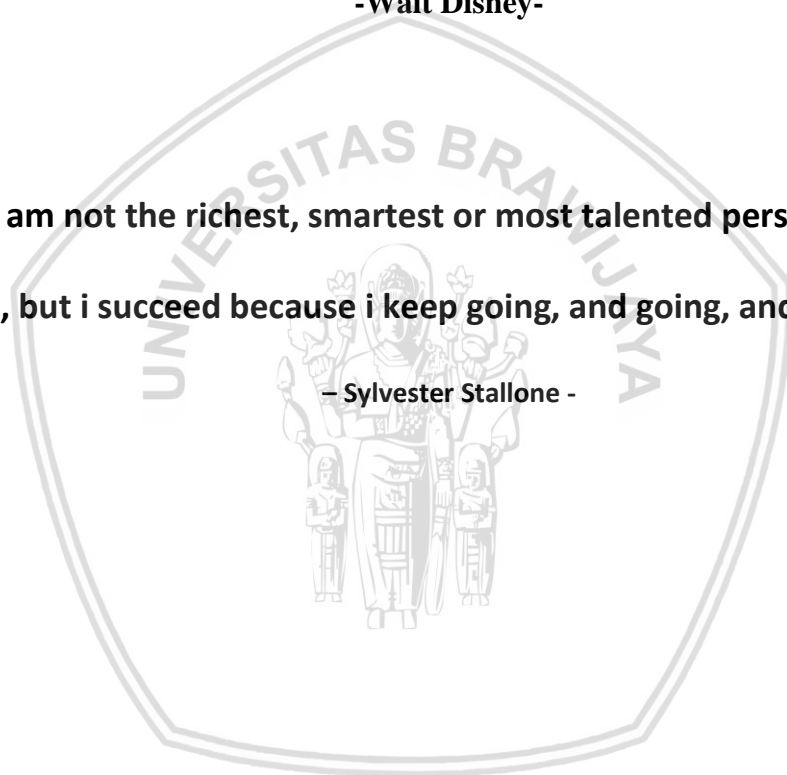
“Why worry? If you’ve done the very best you can, then worrying won’t make it any better.”

“Kenapa khawatir? Jika Anda telah melakukan yang terbaik yang Anda bisa, maka khawatir tidak akan membuatnya menjadi lebih baik.”

-Walt Disney-

“I am not the richest, smartest or most talented person in the world, but i succeed because i keep going, and going, and going! “

– Sylvester Stallone –



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis ter kutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 13 November 2017

Penyusun,

Aris Tianto

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perlakuan Pajak atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Potensi Peningkatan terhadap Penerimaan Pajak (studi kasus pada Komisi Pemberantasan Korupsi)

Disusun oleh : Aris Tianto

NIM : 115030400111080

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan



Malang,

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Siti Ragil Handayani, M. Si

Eko Supriyatno, SE, M.Si

NIP. 19630923 198802 2 001

NIP. 19660725 198810 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juli 2018

Jam : 10.00 WIB

Skripsi Atas Nama: Aris Tianto

Judul : Perlakuan Pajak atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Potensi Peningkatan Terhadap Penerimaan Pajak (studi pada kasus Tindak Pidana Korupsi Reklamasi Teluk Pantai Jakarta dengan tersangka M. Sanusi)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Dr. Siti Ragil Handayani, M. Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota

Anggota

Priandhita S. A. SE, MKA, Ak **Mirza Maulinarhadi R. SE, MKA, Ak**

NIP. 19861117 201504 2 002

NIP. 2012018412112000

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah atas segala karunia yang diberikan kepada penulis menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul **“Perlakuan Pajak atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Potensi Peningkatan terhadap Penerimaan Pajak ”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku ketua jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku ketua program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita S Asmoro. SE.,MSA.AK,CA selaku sekretaris program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Ibu Dr. Siti Ragil M.Si selaku ketua komisi pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Eko Supriatno SE, M.Si selaku anggota komisi pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu pegawai KPK Jakarta yang telah memberikan izin serta bantuan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
9. Orang tua peneliti bapak Bambang Suparmin dan Ibu Sutinah yang peneliti cintai dan hormati, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa sehingga peneliti tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik peneliti, Andi dan Anggi yang selalu menyemangati, mendukung dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rizka Kharisma Putri yang senantiasa membantu dan mendoakan agar peneliti tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat peneliti di Malang Agus, Emir, Vega, Raihan, Neno, dan Andre serta teman-teman Hore FC sekalian yang telah menemani peneliti selama di Malang.
13. Teman-teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2011.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang membutuhkan saran dan kritik dari pembaca agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2017

Peneliti



Skripsi ini saya persembahkan untuk
Bapak Bambang , Ibu Sutinah, Anggi ,
Andi dan Kare



RINGKASAN

Aris Tianto, 2017, **Perlakuan Pajak Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Potensi Penerimaan Pajak**, Dr. Siti Ragil Handayani, M. Si. Eko Supriatno, SE, M. Si

Kasus tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dianggap berat oleh masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, salah satu cara yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pertukaran data dan Informasi perpajakan. Pertukaran informasi perpajakan merupakan salah satu bentuk perlakuan pajak yang dapat dilakukan dalam sebuah kasus korupsi. Data informasi perpajakan yang digunakan dalam penindakan kasus korupsi adalah Surat Pembertitahuan Pajak (SPT). Tujuan dari perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi adalah mengemablikan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari objek yang diteliti menggunakan pedoman wawancara yang diberikan kepada pejabat perwakilan di kantor KPK, Jakarta dan Kantor DJP Pusat. Teknik analisi data pada penelitian ini menggunakan analisis reduksi data..

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pajak dapat digunakan dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi namun belum terdapat potensi peningkatan terhadap penerimaan pajak, Karena perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi belum di implementasikan secara konsisten.

Kata Kunci : Perlakuan Pajak, Tindak Pidana Korupsi, Potensi Penerimaan Pajak

SUMMARY

Aris Tianto 2017, **Tax Treatment on Cases of Corruption and its Relation to the Potential of Tax Revenue**. Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si, Eko Supriatno, SE, M.Si.

The case of corruption is one of the most serious crimes considered by society. The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK) is doing its utmost to eradicate corruption cases in Indonesia, one of the ways to do this is to establish cooperation with the Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak/ DJP) through data exchange and taxation information. The exchange of tax information is one form of tax treatment that can be done in a corruption case. Data taxation information used in the prosecution of cases of corruption is Tax Dispute (SPT). The purpose of the tax treatment of corruption cases is to eliminate state losses and provide deterrent effect to the perpetrators.

The type of research used in this research is Descriptive research with qualitative approach. Data collection is done by interview and documentation technink. The data collection of this research is done by collecting data directly from the object under study using interview guidance given to the representative official in KPK office Jakarta and Central DJP office. Data analysis techniques in this study using data reduction analysis.

The results of this study indicate that tax treatment can be used in the prosecution of cases of corruption but there is no potential increase in tax revenue, because the tax treatment of corruption has not been implemented consistently.

Keyword: Tax Treatment, Corruption Crime, Tax Benefit Potential

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Perpajakan	
1. Pengertian pajak	16
2. Fungsi pajak	18
3. Sistem Pemungutan Pajak	18
4. Definisi Wajib Pajak	19
5. Surat Pemberitahuan (SPT)	19
6. Tahun Pajak	20
7. Sanksi terlambat atau tidak melaporkan SPT	21
8. Pemeriksaan Pajak	22
9. Surat Tagihan pajak	24
C. Pajak Penghasilan	
1. Pengertian Pajak Penghasilan	26
2. Subjek Pajak Penghasilan	27
3. Tidak Termasuk Pajak Penghasilan	28
4. Objek Pajak	29
5. PPH 21	30
D. Tindak Pidana Korupsi	

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30
2. Penyidikan Tindak Pidana korupsi.....	34
E. Penerimaan Negara	
1. Pengertian Penerimaan Negera.....	36
F. Kerangka Pemikiran.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Penyajian Data	50
C. Pembahasan dan Analisis data.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

LAMPIRAN	93
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah kasus korupsi yang teridentifikasi tahun 2015	64
2.	Realisasi penerimaan PPH non Migas tahun 2015	83



DAFTAR GAMBAR

No,	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	39
2.	Model Analisis Data Interaktif	46
3.	Struktur Organisasi KPK	49



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara Pak Daud (DJP)	90
2.	Pedoman Wawancara Pak Budhi (KPK).....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara tidak lepas dari isu politik, sosial dan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat menjadi motor penggerak jalannya kelangsungan suatu negara dengan peran masing-masing yang dimiliki. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum sedangkan masyarakat sebagai pelaksana dari dua aspek tersebut. Proses berjalannya kehidupan bernegara tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki, karena selalu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum pemerintahan akibat dari dinamika sosial, politik dan ekonomi pada suatu negara. Dua contoh pelanggaran yang cukup mempengaruhi kehidupan bernegara yaitu pelanggaran pajak dan korupsi.

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis. *Self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*, sistem yang dianut Indonesia adalah *self assessment*. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) khususnya ayat 1 dan 2, Wajib Pajak wajib menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajiban tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan

Wajib Pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajiban dalam membayar pajak yang terutang yang terlambat atau belum dibayar. (Velayati, 2012:2)

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, meletakkan tanggung jawab secara penuh kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib pajak diminta untuk membayarkan secara sukarela sesuai dengan jumlah penghasilan neto. Dalam prakteknya masih banyak terjadi penyelewengan sistem perpajakan baik oleh wajib pajak dan pegawai pajak yang memberikan celah terjadi kasus tindak pidana perpajakan dan korupsi. Fungsi Direktorat Jendral Pajak sebagai pengawas dan penegak hukum harus berjalan secara optimal guna tercapainya target penerimaan pajak.

Menurut survei yang dilakukan oleh *Transperancy international* sebagai lembaga riset dan survey internasional mengenai Indeks persepsi korupsi pada tahun 2014 Indonesia menempati urutan ke 117 dari 175 negara di dunia, dengan skor 34 dari skala 0 – 100 yang berarti Indonesia masih dikatakan negara yang korup. Korupsi di bidang perpajakan juga mengurangi potensi penerimaan perpajakan. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada kepala subdirektorat bukti permulaan DJP Handang Soekarno dalam kasus permintaan penghapusan surat tagihan pajak (STP) menyebabkan kerugian potensi penerimaan pajak yang masih harus dibayar oleh PT. Eka Prima Ekspor Indonesia sebesar 78 Miliar Rupiah. (diambil dari www.TransperancyInternational.co.id, 15 September 2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang sangat gencar melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu

ujung tombak penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi konsisten melakukan penindakan kasus-kasus korupsi meskipun melibatkan elit politik atau anggota lembaga pemerintahan. Mereka tidak pandang bulu dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, mengingat dampak yang ditimbulkan lebih besar dari jumlah kerugian yang ditanggung oleh negara.

Berdasarkan pemantauan terhadap kinerja penegak hukum yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* Jakarta, KPK berhasil menangani 18 kasus Korupsi selama periode semester pertama tahun 2016, dengan nilai kerugian negara mencapai 164 miliar rupiah dan nilai suap mencapai 28 miliar rupiah, 1,6 juta dolar Singapura dan 72 juta dolar amerika. (*Indonesia Corruption Watch*, 2016:13)

Selain hukuman pidana penjara, tersangka korupsi juga dikenakan hukuman uang pengganti. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 jumlah tunggakan uang pengganti yang belum ditagih Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) Rp. 13.146 Triliun. Jumlah tersebut terdiri dari uang pengganti di bidang korupsi khusus Rp. 3,5 Triliun dan di bidang perdata Rp. 9,6 Triliun. Uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan negara. Masalah eksekusi uang pengganti berkaitan dengan sulitnya melacak jumlah harta tersangka yang diperoleh dari hasil korupsi.

Koordinator Monitoring dan Analisis Data *Indonesia Corruption Watch* Firdaus Ilyas mengatakan, “ ada empat titik potensial terjadi korupsi dalam pengelolaan pajak yang selama ini lepas dari perhatian publik. Titik itu adalah Pengadilan Pajak, proses rekonsiliasi data, penagihan piutang negatif atau pemutihan, dan restitusi pajak. Sebagian besar putusan tidak menguntungkan negara, dikalahkan oleh

Pengadilan Pajak. Jadi, pendapatan negara berkurang”. (<http://www.antikorupsi.org> di akses pada tanggal 18 januari 2017). Data yang dimiliki ICW menunjukkan, selama 2002-2009, gugatan dan banding yang masuk ke Pengadilan Pajak mencapai 22.249 berkas. Sebanyak 16.953 berkas bisa diterima secara formal dan sisanya ditolak. Putusan yang mengabulkan gugatan wajib pajak mencapai 13.672 berkas atau sebesar 81 persen, potensi pendapatan negara yang hilang karena kekalahan dalam pengadilan pajak sedikitnya Rp 12,2 triliun. .

Terdapat perbedaan persepsi objek pajak dalam tindak pidana korupsi dan dunia perpajakan. Dalam dunia perpajakan tidak mempertimbangkan cara memperoleh dan asal sebuah tambahan ekonomis, namun dalam tindak pidana korupsi sangat memperhatikan sumber dan cara mendapatkan kekayaan, apakah bertentangan dengan undang-undang. gratifikasi, bonus, komisi dan imbalan, dalam bentuk lainnya yang justru sering menjadi fakta persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materil maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tipikor (Syamsudin,2011). Harta kekayaan menurut pajak dan korupsi terkadang berlawanan. Dalam perpajakan tidak mengenal bagaimana cara harta tersebut diperoleh, pajak tidak mempermasalahkan baik atau buruk sumber harta, pajak hanya melihat jumlah harta sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Dalam korupsi sumber dan cara memperoleh harta merupakan dasar mempersepsikan, jika terdapat unsur korupsi dan dapat merugikan negara, maka harta tersebut dianggap tidak sah dan wajib disita oleh negara.

Segala upaya pencegahan telah dilakukan oleh berbagai Pihak untuk menekan maraknya kasus tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan korupsi yaitu pada tanggal 23 Februari 2005 menandatangani Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berisi kerjasama untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi mulai dari pemberian edukasi sampai pertukaran data dan informasi untuk mempermudah penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.

Kedua Lembaga Pernah melakukan Pertukaran data dan informasi dalam penanganan kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri yang merugikan negara sekitar 1.259 Triliun Rupiah dan dijatuhi denda dua kali pajak terhutang 2,5 Triliun Rupiah. (news.detik.com diakses pada tanggal 18 September 2016). Berawal dari kasus tindak pidana pencucian uang Vincentius Amin selaku *financial controller* PT. AAG yang menyerahkan dokumen dan bukti penggelapan pajak kepada KPK, selanjutnya di berikan kepada DJP selaku otoritas yang berwenang menangani kasus perpajakan. Melalui data dan informasi yang diberikan oleh KPK, DJP berhak melakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada Suwir Laut selaku *head tax officer* PT. AAG. Vincentius Amin tetap di hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang, sedangkan 5 petinggi PT.AAG dihukum dalam kasus penggelapan pajak atas nama Suwir Laut. Dari kasus ini kita dapat terlihat, pertukaran data dan informasi antara kedua lembaga sangat bermanfaat dalam penanganan sebuah kasus korupsi dan juga dapat mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus tindak pidana terkait.

Terkait perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi, tahun 2016 terdapat sebuah kasus yang menjerat mantan anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi. Tersangka terlibat dalam kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Dalam fakta persidangan tersangka terbukti menerima suap dan memiliki harta kekayaan yang tidak dicantumkan kedalam SPT. Melalui alat bukti SPT dan keterangan saksi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, Pontas Pane memperkuat adanya pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh tersangka. Hal tersebut membuktikan perlakuan pajak dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dengan didukung Nota Kesepahaman antara KPK dan DJP yang memuat kerja sama pertukaran data dan Informasi perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan berdasarkan data dan informasi yang diterima DJP. Seperti yang tertuang pada pasal 43A Undang-Undang KUP yang berbunyi “Direktur Jendral Pajak berdasarkan data, informasi dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”. (Ilyas dan Burton,2012:127)

Kerja sama antara kedua lembaga pemerintah tersebut memberikan iklim positif serta meningkatkan semangat antikorupsi di Indonesia. Cara lain yang dapat digunakan dalam upaya penindakan kasus tipikor adalah dengan memanfaatkan aspek-aspek perpajakan orang yang bersangkutan. Penyidik dapat mengetahui status dan sumber harta terduga korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan pajak (SPT). .

Dalam SPT akan dicocokkan semua transaksi penerimaan atau pembayaran dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Jika ada transaksi yang janggal akan dengan mudah ditemukan, karena terjadi ketidakcocokan antara SPT dengan harta yang sesungguhnya. Dari hal tersebut akan diperoleh bukti permulaan bahwa terduga telah melakukan kelalaian dalam pelaporan SPT dan terindikasi korupsi. Sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan ada konsekuensi apabila jumlah penghasilan dalam SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 jika dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau disampaikan namun isinya tidak benar, dapat dikenakan hukuman penjara dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terutang.

Harta kekayaan hasil korupsi tidak akan pernah dilaporkan kedalam SPT tahunan karena tersangka tidak ingin diketahui memiliki harta lebih dari apa yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan, dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi merupakan harta kekayaan pribadi atau kelompok yang disembunyikan dari aspek hukum pidana dan perpajakan. Dari ulasan di atas, terdapat peran undang-undang perpajakan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Terdapat hubungan antara kasus tindak pidana korupsi dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan “Penggunaan UU Pajak (KUP) dilakukan karena hampir semua hasil kejahatan korupsi disembunyikan, dan hampir semua yang disembunyikan tersebut pasti tidak membayar pajak. Sehingga penggunaan UU Pajak dalam kasus korupsi dan pencucian uang menjadi penting.” (www.pajak.go.id, diakses 10 juli 2015). Pernyataan tersebut sedikit

menjelaskan bahwa UU Pajak sangat berguna dalam proses penuntasan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan diharapkan perlakuan pajak terhadap kasus tindak pidana korupsi dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Tidak ada definisi yang baku tentang perlakuan pajak, namun menurut kamus besar Bahasa Indonesia perlakuan adalah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang, dengan kata lain perlakuan pajak adalah perbuatan atau perilaku perpajakan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Dalam penelitian ini yang dikatakan sesuatu adalah tindak pidana korupsi, maka perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi adalah perbuatan atau perilaku perpajakan yang dikenakan terhadap tindak pidana kasus korupsi. Penegakan Hukum dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten. Tujuan utama perlakuan pajak atas kasus tipikor adalah mengembalikan kerugian, negara sedangkan manfaat yang didapat DJP apabila dilakukan secara konsisten adalah meningkatnya potensi penerimaan pajak yang akan membantu tercapainya target pajak tahun berjalan.

Perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi di antaranya, pemeriksaan SPT tersangka, saksi ahli di bidang perpajakan bahkan dapat penggunaan sanksi perpajakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perpajakan dalam kasus tersebut. Contoh negara yang memberikan aturan antara korupsi dan perpajakan adalah Belanda, dalam *netherland Income Tax act 2001* pada *article 3.14* tentang *deduction of general expenses* huruf *h* menyebutkan “ *gift, promises or service if it appearse there is a criminal offense under article 126, paragraph 177, 177a, 178, 178a* “ dalam undang-undang di atur dan disebutkan bahwa janji dan pemberian yang berkaitan dengan tindakan kriminal termasuk biaya yang tidak dapat

dikurangkan. Sedangkan di Indonesia belum diatur secara spesifik tentang hal serupa yang berkaitan dengan tindakan kriminal. seperti yang tercantum pada UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tentang objek pajak.

Terdapat dua cara dalam menghimpun penerimaan pajak yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Jika kantor pajak memiliki data dan informasi SPT tersangka atau terduga korupsi, hal ini dapat mempermudah DJP dalam menghimpun Pajak terutang yang belum dibayarkan oleh terduga korupsi, yang akan memberikan dampak kepada peningkatan penerimaan pajak pada tahun pajak berjalan. Apabila hal ini dilakukan bukan tidak mungkin DJP mengalami peningkatan penerimaan pajak dari penghasilan kasus tindak pidana korupsi, selain itu perlakuan pajak tersebut juga sebagai upaya mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti menyadari terdapat potensi peningkatan terhadap penerimaan pajak apabila perlakuan pajak diterapkan dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi. Menyebutkan perihal tentang pajak, secara otomatis kita berbicara tentang mekanisme dan tata cara pemungutannya terhadap sebuah objek atau subjek pajak tertentu. Mempersamakan perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi dengan perlakuan pajak terhadap subjek pajak yang melanggar pelaporan SPT tidak jujur jika terbukti dalam kasus persidangan tipikor perlu dilakukan peninjauan khusus dengan mempertimbangkan objek pajak penghasilan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 yang memuat berbagai objek pajak contohnya seperti, penggantian atau imbalan berkenaan dengan

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak.

Lokasi Penelitian yang dipilih peneliti adalah Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan HR. Rasuna Said Jakarta. Karena KPK adalah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus Korupsi agar peneliti dapat fokus mengkaji dan menelaah kasus korupsi secara mendalam. Dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan peneliti berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan masalah-masalah yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi serta mencari solusi yang dapat diterapkan.

Berdasarkan ulasan di atas peneliti akan berusaha menganalisa fakta dan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi melalui aspek hukum perpajakan dan penindakannya dengan judul skripsi **“Perlakuan Pajak atas Kasus Tindak Pidana Korupsi dan keterkaitannya dengan Potensi Peningkatan terhadap Penerimaan Pajak”** .

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi ?
2. Apakah perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi berpotensi terhadap peningkatan penerimaan pajak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi .
2. Mengetahui perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi berpotensi terhadap peningkatan penerimaan pajak.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, antara lain :

1. Kontribusi Akademis

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas wacana dan pengetahuan serta penerapan ilmu-ilmu yang belum didapatkan selama perkuliahan, khususnya mengenai perlakuan pajak khusus terhadap kasus pidana korupsi yang di tangani Komisi Pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain di masa mendatang khususnya dalam bidang yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, dan memperkuat hubungan antar lembaga Negara dalam menyatukan pikiran untuk melawan aksi tindak pidana korupsi di semua lini kelembagaan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi DJP untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan potensi penerimaan pajak.

- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kasus tindak pidana korupsi serta upaya perlakuan pajak dalam penindakan kasus korupsi.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pengungkapan masalah yang bersifat ilmiah memerlukan adanya pengamatan secara teliti, cermat dan terarah. Suatu perencanaan harus diikuti dengan pelaksanaan yang sungguh-sungguh agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Rencana tersebut harus disusun secara sistematis agar memudahkan pelaksanaannya. Dalam skripsi ini peneliti melakukan pembahasan menjadi lima bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan di bahas dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahsan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori dasar yang relevan dengan topik penelitian, yang nantinya akan dipakai dalam memecahkan permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka yang diambil berhubungan dengan tindakan hukum perpajakan terhadap penghasilan kasus tindak pidana korupsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi tersebut dilaksanakan, jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data mengenai gambaran Komisi Pemberantasan Korupsi beserta permasalahannya secara kronologis menurut tujuan penelitian, menganalisa serta menginterpretasikan data yang ada sesuai dengan tahapan dengan cara yang telah ditetapkan pada metode penelitian sesuai dengan konsepsi dan teori yang dipakai dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil pembahasan sedangkan saran merupakan implementasi dari rekomendasi ataupun penemuan-penemuan mengenai fakta dan penerapan hukum perpajakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terhadap perlakuan pajak dan potensi penerimaan pajak oleh beberapa peneliti dalam bentuk skripsi. Pertama adalah penelitian oleh Isra tahun 2006 yang berjudul Analisis Perlakuan Pajak atas Transaksi Murabahah : suatu studi untuk menentukan kepastian hukum. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dengan fokus penelitian menentukan kepastian hukum terhadap perlakuan pajak transaksi murabahah.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lesmana pada tahun 2013 yang berjudul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup Sebagai Upaya Baru Penegakan Hukum Dibidang Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan fokus penelitian penegakan hukum perpajakan bukti permulaan.

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Putro pada tahun 2014 dengan judul penelitian Pengendalian Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap Rasio Penerimaan Pajak di Negara-Negara Asia Tenggara. Fokus penelitian ini adalah pengendalian korupsi dengan mengimplementasikan regulasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas diketahui bahwa belum ada penggunaan tindak pidana korupsi sebagai objek penelitian. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan tindak pidana korupsi sebagai objek penelitian untuk mengetahui mekanisme perlakuan pajak dan keterkaitannya dengan potensi

penerimaan pajak. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu di rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun) / Judul	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Isra (2006) Analisis Perlakuan Pajak Atas Transaksi Murabahah	Kepastian Hukum perlakuan Pajak transaksi murabahah	Menganalisa Perlakuan Pajak atas Transaksi Murabahah	Potensi penerimaan pajak atas perlakuan pajak transaksi murobahah belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Rafika Amilia Lesmana (2014) Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup Sebagai Upaya Baru Penegakan Hukum Perpajakan	Pemeriksaan bukti Permulaan Tertutup	1. Mengetahui efektifitas pemeriksaan bukti permulaan sebelum PMK Nomor 18/PMK.03/2012 2. Mengetahui Hambatan yang dihadapi pemeriksa buti permulaan sebelum PMK Nomor 18/PMK.03/2012 3. Mengetahui bagaimana Kebjikan Pemeriksaan tertutup sebagai Upaya Baru Penegakan Hukum Perpajakan.	1. Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum PMK Nomor 18/PMK.03/2012 belum efektif 2. Wajib Pajak cenderung menghindari pemeriksaan bukti permulaan dengan cara menyembunyikan bukti dan melarikan diri 3. Pemeriksaan bukti permulaan mengalami perubahan yang signifikan dari pemeriksaan bukti permulaan sebelum PMK Nomor 18/PMK.03/2012
Putra (2014) Penegendalian Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap Rasio Penerimaan Pajak	Upaya Pengendalian korupsi	Mengetahui pengaruh pengendalian korupsi terhadap rasio penerimaan pajak	Upaya pengendalian korupsi perlu terus ditingkatkan agar rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga meningkat.

Sumber : Data diolah, 2016

B. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Sebelum berbicara lebih jauh tentang pajak tentu sebelumnya kita harus mengetahui definisi pajak menurut para ahli, terdapat berbagai definisi pajak dari pakar, penulis akan memaparkan definisi pajak dari beberapa ahli yang akan memberikan penjelasan atau gambaran umum tentang apa yang disebut dengan pajak. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:11) menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dari yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi ahli lain, P. J. A. Andriani dalam Waluyo, (2009:2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut undang undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat kita simpulkan terdapat unsur-unsur yang sama dan dapat kita jadikan gambaran mengenai definisi pajak itu sendiri, unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Berasal dari iuran masyarakat
- b. Dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya
- d. Tanpa memberikan kontraprestasi secara langsung
- e. Hasilnya diperuntukan membiayai pembangunan dan pengeluaran Negara

Jadi, dengan kata lain pajak dapat didefinisikan sebagai iuran masyarakat dapat dipungut secara paksa oleh Negara yang diatur melalui undang-undang tanpa harus memberikan jasa timbal balik langsung kepada masyarakat dan hasilnya dijadikan sumber dana pembangunan dan pengeluaran negara lainnya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perlakuan adalah perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Dapat dikatakan yang disebut perlakuan pajak adalah perbuatan atau perilaku perpajakan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Contoh, perlakuan pajak atas deviden, perlakuan pajak atas penghasilan orang pribadi dan perlakuan pajak atas penghasilan badan.

Perlakuan pajak pada dasarnya mengedepankan aspek administrasi sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. namun bukan tidak mungkin perlakuan pajak juga memproses tindak pidana apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mengandung unsur tindak

pidana yang merugikan negara seperti dalam kasus tindak pidana korupsi perpajakan.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memiliki dua fungsi (Mardiasmo, 2011:2), yaitu :

- a. Fungsi anggaran atau *budgetair* berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur atau *Regulrend* sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (Mardiasmo, 2011:7), yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besaran wajib pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Definisi Wajib Pajak

Terdapat dua jenis Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, sedangkan pengertian Wajib Pajak itu sendiri menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan, Orang pribadi adalah subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan pengertian badan mengacu pada undang-undang ketentuan umum perpajakan :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha ang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnnya termasuk investasi kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.”

5. Tahun Pajak

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Tahun pajak merupakan tahun dimana berlakunya pajak terhutang bagi wajib pajak. Sebagai acuan dimulainya pajak terhutang yang harus dilunasi pada tahun tersebut yang berjalan selama 12 bulan yang jatuh tempo pada bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan April untuk wajib pajak badan.

6. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak ;
- 2) Penghasilan yang merupakan objek Pajak dan/atau bukan objek pajak;
- 3) Harta dan Kewajiban dan/atau ;

4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

7. Sanksi Terlambat atau tidak menyampaikan SPT

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp. 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai
- b. Rp. 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya
- c. Rp. 1000.000 Untuk surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan
- d. Rp. 100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- e. Untuk skpkb 2% / bulan maksimal 24 bulan

Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak

yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara dipidana paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut ditambah lagi 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun pajak, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

8. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak,

yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak yaitu,

a. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dilakukan paling lama dalam waktu 4 bulan, dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka waktu pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang paling lama 4 bulan.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi terjadinya transaksi terkait dengan *transfer pricing*/ atau transaksi khusus yang berindikasi terjadinya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, perpanjangan waktu pemeriksaan dapat diperpanjang 5 kali sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Apabila jangka waktu telah berakhir maka pemeriksaan lapangan harus berakhir.

b. Pemeriksaan kantor

Pemeriksaan kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Pemeriksaan kantor atau lapangan dilakukan dengan cara membuat laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar penetapan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan umum peruundang-undangan perpajakan.

9. Surat Tagihan Pajak

a. Pengertian surat tagihan pajak

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda. Surat tagihan pajak diterbitkan setelah keluarnya surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak tertentu yang masih harus dibayar atau lebih bayar.

b. Penerbitan STP

1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar,

- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,
- 3) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga,
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu,
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (selain identitas pembeli dan nama dan tanda tangan)
- 6) Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau
- 7) Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (61) undang-undang pajak pertambahan nilai.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Sejarah pajak penghasilan dimulai dengan pengenalan pajak pendapatan tahun 1932 (inkomsten belasting 1932), lalu diubah menjadi ordonansi pajak pendapatan 1944. Hingga muncul UU nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

(Tjahjono dan Husein, 2005:102). Reformasi perpajakan tersebut memberikan dampak yang positif bagi sektor perpajakan di Indonesia.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah untuk menghimpun sumber penerimaan dari sektor pajak. Pajak penghasilan mendominasi karena dapat dipungut dari banyak pekerja di Indonesia yang memiliki berbagai macam pekerjaan dan jumlah wajib pajak yang cukup banyak baik badan maupun orang pribadi.

Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan ekonomisnya selama satu periode, yakni selama satu tahun, sepanjang kemampuan tersebut berupa uang atau yang dapat diukur dengan uang, sama dengan jumlah konsumsi selama satu tahun. (Muda, 2005:32)

Penghasilan dapat terjadi sebagai akibat di luar tindakan ekonomi atau di luar suatu peristiwa yang dikaitkan dengan atau dilakukan oleh suatu subjek yang sering menjadi pelaku ekonomi. (Regar dalam Tjahjono, 2005:102) dari pernyataan tersebut bisa dikatakan penghasilan merupakan akibat dari seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi baik memenuhi kebutuhan ataupun melakukan penyediaan barang dan jasa.

Menurut Soebakir (1999:41) mengemukakan definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan kemampuan

ekonomi seseorang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi ataupun tidak melakukan kegiatan ekonomi selama tahun pajak yang diatur oleh undang-undang perpajakan tentang pajak penghasilan.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan atas subjek pajak penghasilan selama satu tahun pajak, yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komandite, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Badan usaha tetap (BUT).

Dari berbagai macam subjek pajak yang disebutkan di atas, subjek pajak penghasilan masih dapat dibedakan menjadi :

- a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri yaitu :
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Inonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan.
 - 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

c. Subjek pajak luar negeri

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sedangkan subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. (Mardiasmo, 2011:137).

3. Tidak termasuk Subjek Pajak

Pajak memang diwajibkan kepada seluruh masyarakat, namun pajak juga masih memperhatikan unsur-unsur lain dalam penereapannya untuk tidak memungut dari subjek yang dikecualikan, diantaranya :

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Perwakilan pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbahantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal

balik.

c. Organisasi Internasional, dengan syarat :

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :

- 1) Bukan warga neara Indonesia
- 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Objek Pajak

Yang menjadi Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. (Mardiasmo, 2001:139).

Objek pajak juga dapat dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak, yang menentukan besarnya penghasilan sebelum dikurangi biaya – biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Dapat berupa barang atau jasa yang telah ditentukan oleh undang – undang perpajakan.

5. Objek pajak PPH 21

PPH 21 merupakan pajak yang di pungut atas penghasilan orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi PTKP, dengan ketentuan tarifnya telah

ditentukan oleh pasal 17 undang – undang pajak penghasilan. Dimana besaran tiap wajib pajak berbeda sesuai dengan beban hidup dan penghasilan yang diterima.

6. PPH Pasal 21

Pengertian PPH pasal 21 yang dikemukakan Priantara (2013:269) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan nama lain dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri).

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian korupsi

Drs. R. Dyatmoko Somodiharjo dalam Djojo (2010:53) menyebutkan terdapat 30 jenis korupsi berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

“Pertama: Korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara; menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara.

Kedua: korupsi terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada negeri karena jabatannya ; pegawai negeri menerima suap ; pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; haki dan advokat yang menerima suap; hakim yang menerima suap; advokat yang menerima suap.

Ketiga: korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan

adminsitrasi; pegawai negeri merusakkan bukti; pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti; pegawai negeri membant orang lain merusakkan bukti.

Keempat: korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras; pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

Kelima: korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekananTNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain.

Keenam : korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai neeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

Ketujuh : korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor komisi pembertantasa korupsi”.

Penyebab Korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua dalam Djojo (2010:45) yaitu :

a. Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru

Sebagai Negara yang baru merdeka atau Negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan dibidang pendidikan, tetapi, selama puluhan tahun, mulai dari orde lama, orde baru sampai reformasi 1998, pembangunan difokuskan dibidang ekonomi. Padahal setiap Negara yang baru merdeka, terbatas dalam SDM, uang, management dan teknologi. Konsekuensinya semua didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghaslkan penyebab korupsi yang kedua.

b. Kompensasi PNS yang rendah

Wajar saja Negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Tetapi disebabkan prioritas pembangunan dibidang ekonomisehingga secara fisik dan cultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli mappun mark up kecil – kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi.

c. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh system pembangunan seperti d atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek proyek pembangunan, bshksn berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang *share holder* dari perusahaan tersebut.

d. *Law Enforcment* tidak berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNSnya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir diseluruh lini kehidupan, baik disintansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu di ukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (Kasih uang habis perkara)

e. Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan praktek KKN.

f. Pengawasan yang tidak efektif

Dalam system management yang modern selalu ada instrument yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan, *internal control* disetiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuklah irjen dan bawasda yang bertugas melakukan *internal audit*. Malangnya, system besar yang disebutkan dibutir 1 di atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong – royong dalam menyburkan KKN.

g. Tidak ada keteladanan pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata

dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relative singkat. Thailand telah mengalami *recovery* ekonomi. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Maka, bkan saja perekonomian Negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

h. Budaya Masyarakat yang kondusif KKN

Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistic. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari, mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau Universitas, melamar kerja dan lain – lain. Karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan tidak salah.

2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik

menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 pasal I angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak

tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

E. Penerimaan Negara

1. Pengertian Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan penerimaan negara meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan Negara, denda dan sumbangan masyarakat. (Syamsi, 1994:85)

Dahulu pajak adalah satu-satunya sumber untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Tidak ada pajak tidak ada kegiatan pemerintahan. Sekarang,

pajak masih merupakan sumber keuangan Negara yang paling penting bagi semua negara di dunia.(Boediono,2011:110)

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2012:168)

Pajak memang mengurangi konsumsi seseorang sebagai akibat berkurangnya pendapatan, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, pengenaan pajak tidak berarti mengurangi kesejahteraan seseorang (Cullis dan Jones dalam Mukhlis dan Simanjuntak, 2012:202). Transfer penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan dapat terlaksana.

Peran strategis pajak dalam perekonomian secara teoritis dipertegas oleh Davoodi dan Zou (1998) dalam studinya bahwa pengenaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di

negara maju maupun Negara berkembang. Walaupun pajak mengurangi konsumsi individu, tetapi pengenaan pajak diiringi dengan pengeluaran atau pembelian pemerintah, ternyata melalui efek *multiplier* dapat meningkatkan pendapatan nasional yang gilirannya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. (Mukhlis dan Simanjuntak, 2012:204)

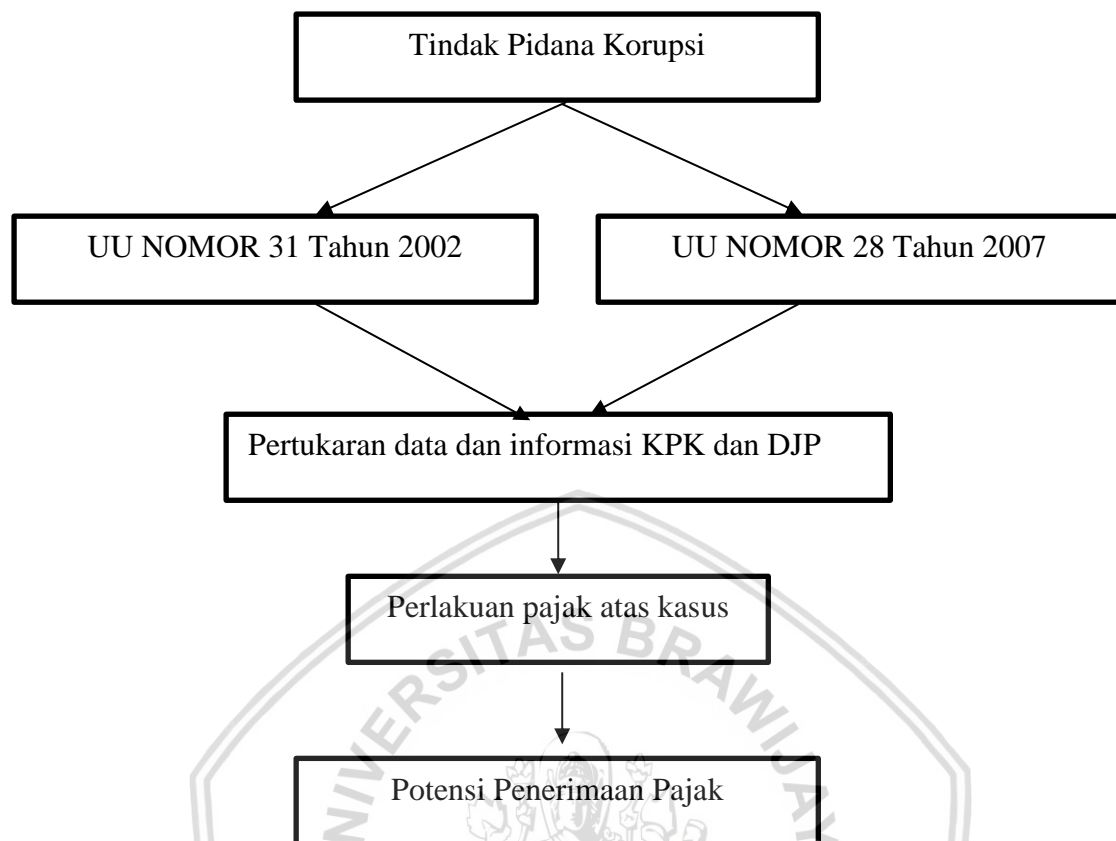
F. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Indonesia menempati urutan ke 117 dari 175 negara di Dunia yang disurvei oleh *Transperancy Internatinal*. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selaku lembaga berwenang untuk mengurangi dan menindak kasus- kasus korupsi di Indonesia.

Salah satu upaya penindakan korupsi di Indonesia dengan melibatkan DJP selaku otoritas pajak sebagai pemeriksa SPT tersangka korupsi guna mengetahui jumlah harta yang dilaporkan oleh tersangka kasus korupsi.

Penggunaan pendekatan perpajakan dinilai dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Melalui pemanfaatan peraturan perpajakan untuk menindak tegas pelaku korupsi yang melakukan pelanggaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk mencari tahu mekanisme perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi dapat memberikan potensi penerimaan pajak dengan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran
Sumber : Data diolah (2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti untuk melaksanakan dan menyusun hasil penelitian. Metode penelitian memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menganalisis data hingga pada pengambilan keputusan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sujarweni, 2014:11). Sedangkan menurut (Pasolong, 2012:75) penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan mempresentasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi/ada. Penelitian deskriptif juga bisa terjadi atas adanya suatu fenomena, yang dimaksud fenomena ialah kejadian/peristiwa yang terjadi pada saat itu, maka dari fenomena tersebut mengakibatkan timbulnya suatu penelitian. Menurut pemaparan Moleong (2012:6), suatu penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain, secara holistik dan dengan cara yang deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena subjek dari penelitian ini merupakan persoalan perpajakan yang membutuhkan penggalian data secara deskriptif terhadap Perlakuan Pajak atas Tindak Pidana Korupsi dan Potensi Peningkatan terhadap Penerimaan Pajak..

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif sendiri dapat menimbulkan pemikiran keaspek lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari penelitian. Maka dari itu fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Ada maksud tertentu yang ingin dicapai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria keluar masuknya informasi, (Moleong, 2012:94)

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti menetapkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme penindakan terhadap pelanggaran pajak.
2. Mekanisme pertukaran data dan Informasi KPK dan DJP

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data. Dipilihlah lokasi yang sesuai dan dapat menunjang kegiatan penelitian tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi bidang tipikor merupakan salah satu lokasi penelitian yang ditentukan, berlokasi di Jl. HR. Rasuna Said Jakarta

Selatan. Sebagai lembaga penegak hukum RI tentu Komisi Pemberantasan Korupsi menangani secara langsung kasus-kasus tindak pidana korupsi.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan dimana kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam penelitian. Menurut Kaelan (2012:74), sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer (sumber data utama)

Data Primer merupakan data utama karena dari data tersebutlah yang menentukan kesuksesan penelitian yang dilakukan itu berhasil atau tidaknya. Data primer sendiri merupakan data yang berhubungan langsung dengan peneliti. Sumber data tersebut dapat diperoleh menggunakan teknik wawancara dari informan atau narasumber yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Budi Sarumpaet selaku Jaksa Penuntut umum di Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bapak Daud Suranto selaku Kepala Biro Transformasi Pengembangan Bisnis Direktorat Jendral Pajak. :
- c. *Malang Corruption Watch* sebagai lembaga masyarakat yang aktif bergerak dalam pengawasan penindakan kasus korupsi.

2. Data Sekunder (sumber data tambahan)

Data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan penelitian namun tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan penelitian. Dengan istilah lain data sekunder merupakan sumber data pendukung atau penunjang dari data primer dalam penelitian yang sifatnya untuk melengkapi dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data maupun laporan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya :

- a. Profil Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Data jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK
- c. Data Realisasi pengembalian uang pengganti
- d. Data Informasi pendukung berupa undang-undang korupsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu bagian dari rangkaian penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dari informan mengenai penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2015 : 73-74) didalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari diadakannya wawancara ini ialah untuk

menemukan masalah yang terjadi pada penelitian serta dari wawancara tersebut tumbuh ide untuk memecahkan atau menyimpulkan dari suatu penelitian.

Melakukan teknik wawancara ini diperlukan alat bantu seperti alat bantu rekam yang dipergunakan untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Serta dalam teknik wawancara peneliti juga harus menyiapkan pernyataan yang ingin diketahui dari informan yang mendukung sebagai sumber data dari penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selain wawancara yang akan diambil oleh peneliti adalah dokumentasi terhadap penelitian ini. Dokumentasi ialah catatan – catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang Sugiyono (2015:82). Dokumentasi disini meliputi catatan – catatan yang berisi dokumen berupa penerimaan pajak.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki peran yang cukup penting dalam suatu penelitian. Khususnya sebagai alat yang digunakan untuk mendapat data dalam penelitian. Oleh karena itu berdasarkan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, maka instrument penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen penelitian

Menurut Sugiyono (2015:223), menjelaskan bahwa instrumen kunci dalam penelitian sebenarnya adalah peneliti itu sendiri. Peran penelitalah yang menentukan keberhasilan penelitian ini, dimana peran peneliti telah

dilakukan mulai dari menentukan fokus penelitian, menentukan metodologi yang diterapkan dalam penelitian, memahami data menentukan data untuk penelitian serta sumber data penelitian, menentukan metodologi yang diterapkan, memahami serta sampai menganalisis data sehingga data bisa menjadi bahan penyusunan laporan akhir penelitian.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah kelengkapan penelitian yang disiapkan oleh peneliti sebagai panduan atau acuan dalam melakukan wawancara yang berisi tentang fokus penelitian yang akan di tanyakan kepada para informan yang bersangkutan dalam penelitian.

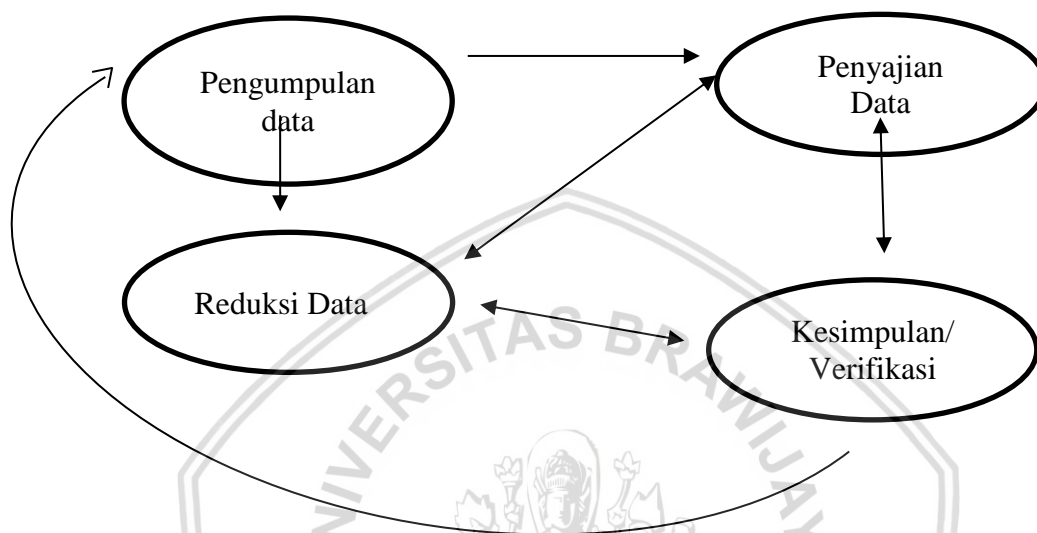
3. Perangkat penunjang penelitian

Perangkat penunjang dalam penelitian ini berupa alat tulis, buku catatan, dan alat rekam suara yang berfungsi sebagai alat bantu yang dilakukan peneliti agar memudahkan dalam melakukan pengumpulan data pada saat wawancara.

G. Metode Analisis Data

Setelah selesai dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari para informan maka selanjutnya data tersebut dianalisis. Fungsi dari analisis data yaitu memperlakukan data empiris ke dalam suatu bentuk data yang dapat diinterpretasikan dan dari analisis data tersebut diharapkan dapat menemukan masalah serta mencari solusi dari masalah tersebut untuk mencapai tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode

analisis data model interaktif. Analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1997), dapat dipahami melalui gambar berikut ini:



Gambar 2: Metode Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Sugiyono (2017:134)

Berdasarkan gambar tentang metode analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana dalam sugiyono (2017:134) dapat dijelaskan dengan alur sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pertama ini adalah pengumpulan data (*data collection*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi. Hasil wawancara ini didukung

oleh data pendukung lainnya yaitu dokumentasi yang terdapat di Kantor dan Website Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap selanjutnya adalah kondensasi atau reduksi data (*data reduction*). Tahap ini menjelaskan setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data – data tersebut kemudian ditelaah. Data – data kasar yang telah ditemukan kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar. Data yang telah ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini. Data yang diambil atau dipilih adalah data yang berhubungan dengan penelitian, sehingga mengabaikan data yang tidak bersangkutan dengan masalah dan fokus penelitian. menjadikan data pada tahapan ini hanya data yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Tahap selanjutnya yang ketiga adalah penyajian data (*display data*). Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format laporan yang ditentukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi.

Penyajian data juga dilengkapi dengan analisis data. Dalam analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan masalah dan fokus penelitian, sehingga data yang disajikan dapat

memberikan pengetahuan serta informasi kepada pihak yang bersangkutan.

4. Verifikasi atau menarik kesimpulan

Tahapan terakhir, yakni verifikasi atau menarik kesimpulan. Dari tahapan penyajian data, peneliti mencari makna dari data pada tahap pertama hingga tahapan terakhir yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan Penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab – akibat dan proposisi. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

H. Keabsahan Data

Menurut Moleong (2012:324-326) keabsahan data memiliki empat kriteria yang digunakan yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Berfungsi melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Kriteria ini ditunjukkan dengan jalan mengadakan replika studi, jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*confirmability*)

Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

Keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah Triangulasi.

Triangulasi merupakan salah satu cara pengujian keabsahan data yang masuk dalam jenis uji *credibility* (validitas internal). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber berbagai cara, dan berbagai waktu. Berikut tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2017:125) ialah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, disini peneliti menggunakan sumber yang terdiri dari dua informan untuk menguji kredibilitas data yaitu Jaksa Penuntut Umum KPK dan Kepala Biro Transformasi Proses Bisnis DJP.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Visi dan Misi

1) Visi

“ Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien “

2) Misi

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Tugas dan Fungsi

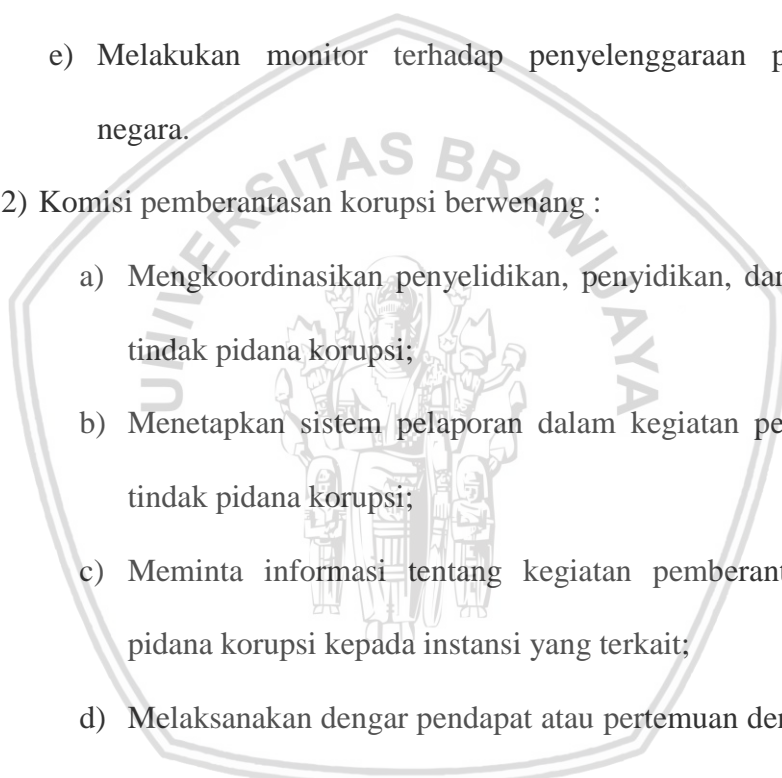
1) Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

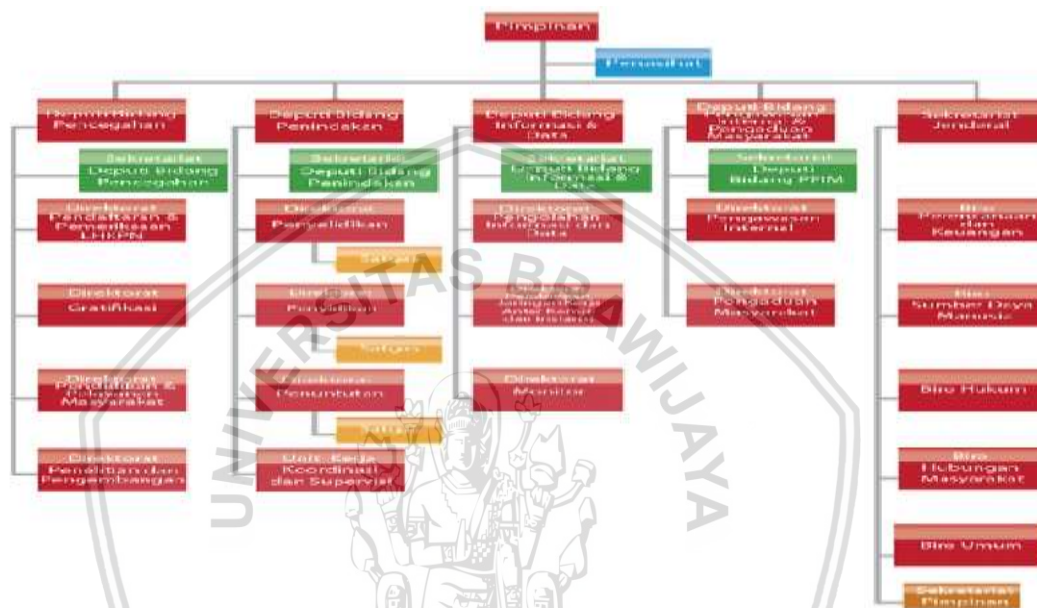
2) Komisi pemberantasan korupsi berwenang :

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.



B. Struktur organisasi komisi pemberantasan korupsi

Berdasarkan lampiran peraturan pimpinan komisi pemberantasan korupsi No. PER-08/XII/2008 30 Desember tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Pemberantasan Korupsi

Sumber : WWW.KPK.go.id / Informasi Publik

C. Lokasi dan Kontak

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi terletak di jalan HR Rasuna Said Kav C1, Jakarta Pusat 12920, telepon (021) 2557 8300, website www.KPK.go.id , dengan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di PO BOX 575 Jakarta 10120, Telepon (021) 2557 8389 dan email pengaduan@kpk.go.id .

D. Hasil Penelitian dan Penyajian Data

Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka berikut ini deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis :

1. Perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi dan keterkaitannya dengan potensi peningkatan penerimaan pajak

Saat ini perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia sangat marak sudah diberbagai sektor kehidupan, baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor-sektor pembangunan lain, mulai dari penyalahgunaan wewenang, tindak pencucian uang dan penyuapan. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan keuangan negara tidak terkecuali dari sektor perpajakan karena terdapat unsur penghasilan yang tidak dilaporkan ke dalam surat pemberitahuan. Berbagai macam upaya hukum sudah dilakukan pihak berwenang seperti KPK, Kepolisian dan Pengadilan. Upaya preventif juga sudah marak dilakukan mulai dari memasukan pelajaran anti korupsi kedalam pelajaran sekolah dasar, sosialisasi media cetak dan elektronik

Menghukum dan mendakwa tersangka korupsi ternyata tidak mudah butuh pemeriksaan khusus mengenai darimana harta korupsi berasal dan peruntukannya. Negara telah banyak mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi, tidak ada salah nya apabila penegak hukum berupaya memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan tersangka, baik berupa hukuman pidana berupa kurungan, denda serta penyitaan aset.

Tindak pidana korupsi juga mengakibatkan kerugian pajak yang di alami negara, mulai dari semua penghasilan yang tidak dilaporkan dengan sebenarnya

karena harta korupsi yang disembunyikan dan pengurangan penghasilan kena pajak karena mencantumkan jumlah yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Hal tersebut sangat merugikan negara, karena tidak dapat memungut pajak secara maksimal yang berdampak pada target penerimaan tahunan dari sektor pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya keras untuk menindak dan menanggulangi budaya korupsi diberbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta. Mengingat aksi tindak pidana korupsi yang menjamur harus di tumpas sampai ke akar-akarnya.

Tentu hal tersebut harus dilakukan penindakan secara hukum pajak yang mengatur pemungutan terhadap barang, jasa dan penghasilan kena pajak selama tidak dikecualikan oleh undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Daud Suranto selaku kepala seksi manajemen proses dan penjaminan kualitas pengembangan Biro Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jendral Pajak,

”Kan didalam undang-undang sudah jelas, segala bentuk penghasilan yang memberi tambahan kemampuan ekonomis yang dapat meningkatkan kekayaan ataupun digunakan untuk konsumsi sudah dapat dikatakan sebagai objek pajak, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai pkp atau tidak sesuai dengan undang-undang penghasilan. Tidak peduli darimana penghasilan tersebut berasal harus tetap dipajaki asal memenuhi unsur yang ditetapkan undang-undang.”

Direktorat Jendral Pajak sebagai fiskus tidak semena-mena dalam melakukan pengenaan pajak terhadap objek pajak. Semua dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum yang ada. Diantaranya, hukum pajak materil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materil yaitu norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formil memuat tata cara untuk mewujudkan hukum materil.

Hal tersebut terkait dengan pengenaan pajak terhadap kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasusnya tidak semua pelaku korupsi menikmati dan mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis. berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus korupsi karena belum tentu yang bersangkutan memiliki kewajiban pajak terutang. Seperti apa yang di katakan oleh bapak Budhi Sarumpaet selaku Jaksa fungsional Direktorat Penuntutan KPK,

“Jika memang undang-undang perpajakan ingin digunakan untuk menghukum tersangka korupsi ya, harus disertai bukti terlebih dahulu apakah si A benar-benar menerima uang hasil kejahatan atau tidak, tergantung apakah tujuan perbuatannya untuk memperkaya diri sendiri atau oranglain, apabila terbukti si A menikmati dan terbukti harus di tindak..”

Kebersinggungan rezim hukum antara UU tindak pidana korupsi dan undang-undang perpajakan bisa terjadi dalam sebuah kasus, seperti yang disampaikan Bapak Budhi Sarumpaet selaku Jaksa Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi,

“Kebersinggungan Hukum Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi, misalnya seorang Dirjen Pajak dalam melaksanakan tugas telah menyalahgunakan wewenang sehingga diduga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Walaupun secara hukum pajak sudah sesuai sistem

administrasi namun apabila dicurigai dan terbukti undang-undang tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk menindak kasus pidana tersebut.”

Perpajakan dan tindak pidana korupsi merupakan bidang yang di atur menggunakan hukum tindak pidana khusus. Keduanya memiliki ranah yang berbeda. Walaupun kedua bidang tersebut sama-sama memiliki sanksi hukum pidana dan denda. Namun untuk tindak pidana korupsi lebih menitik beratkan pada unsur pidana, sedangkan hukum perpajakan lebih mengedepankan aspek administrasi.

Undang-undang perpajakan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dan cenderung memberikan kelonggaran hukum kurungan kepada wajib pajak selama wajib pajak berupaya untuk melunasi hutang pajak yang ditanggung. Untuk undang-undang tindak pidana korupsi sendiri berusaha untuk memberikan hukuman yang setimpal, serta efek jera kepada pelaku sehingga menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi dikemudian hari dan berusaha mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus pidana korupsi.

Menurut Undang-undang perpajakan wajib pajak yang melakukan pelanggaran masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki untuk menghindari sanksi pidana perpajakan, seperti yang disampaikan oleh bapak Daud Suyanto selaku kepala seksi pengembangan proses bisnis direktorat jenderal pajak,

“filosofi utama hukum perpajakan itu untuk mengakkan kepatuhan bukan untuk mempidanakan, sedangkan untuk mempidanakan itu tugasnya polisi, jaksa. Makanya sampai sekarang kita apabila ada penyidikan pajak pada saat penuntutan maka akan kita alihkan ke pengadilan dan jaksa yang akan melakukan penuntutan. Tetapi apabila ada unsur perdata yang keputusannya adalah surat ketetapan maka kita yang akan melakukan penagihan.”

Kasus pidana korupsi mengutamakan unsur pidana dalam penindakannya karena kasus tindak pidana korupsi sangat berdampak kepada lingkungan dimana kasus korupsi tersebut terjadi apabila tersangka tidak dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam wawancara di gedung komisi pemberantasan korupsi bapak Budhi Sarumpaet selaku Jaksa Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan,

“Tipikor merupakan tindak pidana khusus maka undang-undang yang kita pakai dalam penuntutan tersangka adalah undang-undang tipikor, dalam menentukan hukuman JPU mempertimbangkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bagaimana niat dan peran terdakwa dapat meringankan atau bahkan memberatkan hukuman,”

Walaupun undang-undang perpajakan dan tindak pidana korupsi mengatur aspek hukum bidang masing-masing, tetapi kedua lembaga sudah menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama kedua lembaga dalam melakukan tindakan pencegahan ataupun penindakan kasus tindak pidana korupsi, kerjasama tersebut diantaranya dalam bentuk :

- a. Tukar menukar data dan informasi
- b. Bantuan oleh KPK kepada DJP dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- c. Bantuan oleh DJP kepada KPK dalam mendukung pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wajib pajak
- d. Penugasan pegawai KPK kepada DJP atau sebaliknya
- e. Penunjukan pejabat penghubung

- f. Sosialisasi mengenai undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait
- g. Pendidikan, pelatihan dan magang/ pertukaran staf
- h. Kajian sistem
- i. Distribusi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- j. Distribusi formulir gratifikasi

Melihat adanya semangat kedua lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi dibidang masing-masing, hal tersebut membuktikan bahwa kedua lembaga saling mendukung dan berperan dalam penindakan kasus korupsi. Seperti yang disampaikan bapak Budhi Sarumpaet selaku Jaksa Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi,

“saya sangat mendukung sekali adanya kerjasama antar lembaga yaitu KPK dengan lembaga lain baik itu Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Dirjen pajak sangat dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Seperti nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 23 februari tahun 2005”

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Budhi Sarumpaet yang mendukung adanya kerjasama anantara dua lembaga yaitu Komisi Pemberantasan korupsi dan Direktorat Jendral Pajak dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Bapak Daud Suyanto dalam wawancara juga menyampaikan bahwa,

“Sinergi dalam menjaga integritas pegawai-pegawai DJP sangat kuat, mungkin tidak ada lembaga lain yang hubunganya kuat dibanding KPK dan DJP. Karena untuk menjaga integritas tidak hanya pejabat DJP saja tetapi seluruh karyawan DJP melaporkan LHKPN kepada KPK. Walaupun kedua lembaga memiliki bidang preventif masing-masing kita tetap menjalin kerja

sama yang baik untuk menanggulangi terjadi kasus tipikor. Kita DJP dan KPK sudah punya nota kesepahaman”

Kasus tindak Pidana Korupsi sangat berkaitan erat dengan kewenangan. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar kasus tindak pidana korupsi terjadi atas adanya pertemuan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Seperti contohnya kasus suap, yaitu seseorang atau kelompok yang diduga menerima sesuatu atau janji dengan maksud tertentu yang berkaitan dengan kepentingan atau jabatan yang dapat merugikan negara. Menjanjikan sesuatu dengan memanfaatkan kewenangan sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan bernegara karena akan berdampak negatif.

Untuk mengetahui dan melakukan penindakan atas sebuah kasus dibutuhkan data-data pendukung untuk menetapkan seseorang terlibat atau tidak dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan korupsi memiliki tim khusus yang bertugas melacak dan menyelidiki aset tersangka yang biasa disebut tim *assets tracing*. Dipertegas oleh bapak Budhi Sarumpaet selaku Jaksa Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam wawancara beliau mengatakan

“KPK memiliki tim yang kita sebut asset tracing, pada saat kita menetapkan seseorang sebagai tersangka tim itu bekerja mencari informasi mengenai seluruh aset yang dimiliki tersangka. Mulai dari harta bergerak berupa tanah, kendaraan bahkan perbankan, nantinya akan ketahuan itu mana-mana saja yang dia miliki. Biasanya disembunyikan atas nama keluarga atau kerabat, sudah sering kita temukan yang seperti itu.”

Korupsi itu merupakan perbuatan sembunyi-sembunyi, sudah pasti harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana tersebut disembunyikan oleh tersangka. Penyidik harus jeli mencari data dan informasi melalui badan intelejen lembaga yang berwenang dalam kasus tindak pidana korupsi. Setelah data dan

informasi didapat lalu dicocokkan dengan Laporan Hasil Kekayaan yang bersangkutan ataupun melalui Surat Pemberitahuan tahunan. Melalui kedua sarana tersebut akan terlihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan si tersangka dengan mencocokkan penghasilan dan harta yang tercantum dalam Laporan Hasil Kekayaan dan surat pemberitahuan tahunan sesudah dan sebelum kasus tersebut bergulir. Melalui kegiatan tersebut akan terlihat perbandingan anatara penghasilan, harta serta pajak yang mereka bayar. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka patut dicurigai yang bersangkutan melakukan kecurangan atau tindak pidana korupsi.

Penemuan perbedaan antara data dan informasi kekayaan dengan laporan hasil kekayaan pegawai negeri serta surat pemberitahuan tahunan merupakan hal penting dalam penindakan kasus korupsi. dua elemen ini bisa dijadikan acuan untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Bapak Budhi Sarumpaet selaku Jaksa Fungsional Komis Pemberantasan Korupsi menuturkan,

“Selain melakukan OTT atau operasi tangkap tangan, SPT dan LHKPN juga sangat membantu dalam mengusut sebuah kasus korupsi, nanti kita cocokkan semua data apakah bersesuaian atau tidak. Nah dari situ dapat kita simpulkan kalau si A itu korupsi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Jika memang memperkaya orang lain tetap dua-duanya kita perkarakan baik corporate atau pun si orangnya itu.

Setelah melewati proses-proses tersebut lembaga berwenang menghitung jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan oleh tersangka termasuk denda akibat perlakuan curang si tersangka. Selain berperan dalam proses penyidikan perpajakan juga dapat digunakan sebagai pelengkap dalam pengembalian kerugian negara. Dari banyak kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi belum semua kerugian negara berhasil dikembalikan, karena memang sangat sulit melacak seluruh aset yang disembunyikan tersangka.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan aset dimulai saat proses penyidikan berlangsung. Membekukan rekening perbankan agar tidak dapat dipindahkan dan harta yang dimiliki tidak dialihkan ke pihak lain. Langkah cepat tersebut bertujuan memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi.

“kalau sudah terindikasi adanya kasus tipikor semua aset yang sudah di seldiki badan intelijen kita sita rekeningnya kita bekukan supaya tidak bisa dialihkan lagi. Apabila setelah muncul putusan pengadilan yang sah dan si tersangka tidak bisa mengembalikan seluruh kerugian negara semua harta milik dia yang telah kita sita akan kita lelang. Hasil penjualan tersebut masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan bukan pajak.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa harta hasil pengembalian kerugian negara akan masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan bukan pajak. lalu bagaimana jika tidak seratus persen kerugian negara dapat dikembalikan, peneliti berusaha menempatkan undang-undang perpajakan sebagai upaya lain untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Karena terdapat beberapa alasan undang-undang perpajakan dapat melakukan penindakan sebagai upaya tambahan dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi. Apabila terdapat kekayaan bersih yang tersisa dan belum dilaporkan kedalam surat pemberitahuan maka pihak direktorat jendral pajak berhak mengeluarkan surat tagihan pajak kepada tersangka. Diluar adanya kekayaan bersih yang masih tersisa apabila ditemukan pula pelanggaran dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak bahwa yang bersangkutan tidak mengisi dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak mencantumkan penghasilan serta aset kekayaan lain, maka direktorat jendral pajak juga berhak melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan diluar kasus persidangan tindak pidana korupsi. Karena menurut pasal 76 kitab undang-undang hukum pidana bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim. Itulah sebabnya undang-undang perpajakan dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengembalikan kerugian negara berdasarkan denda dan tarif yang berlaku.

Penggunaan undang-undang perpajakan dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi bukan lah fokus utama melainkan bisa digunakan sebagai upaya lain. Seperti yang disampaikan bapak Daud Suranto selaku kepala seksi bidang transformasi proses bisnis direktorat jenderal pajak,

“nah kalau misalkan undang-undang perpajakan sebagai pelengkap mungkin bisa, dalam kasus tindak pidana korupsi itu pasti tidak semua dilaporkan maka bisa kita tindak dengan melihat SPT nya saja. Nanti prosedurnya kita gunakan pasal 35 UU KUP karena kita bisa minta data dari lembaga terkait.”

Untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan juga harus diperhatikan tahun kejadian kasus tindak pidana korupsi tersebut, apabila sudah melewati masa daluarsa perpajakan, maka tidak bisa dilakukan penindakan lagi atas kasus yang dituduhkan karena sudah dianggap selesai. Bapak Daud suranto selaku kepala seksi bidang transformasi proses bisnis direktorat jenderal pajak menuturkan,

“walaupun si A terbukti melakukan pelanggaran perpajakan, kita tidak bisa langsung memberikan sanksi begitu saja. Kita harus mengetahui tahun terjadinya kasus tersebut itu kapan, karena dalam dunia perpajakan ada ketentuan yang disebut daluarsa. Dimana kasus yang ada sudah melampaui ketentuan daluarsa maka kita anggap selesai.”

Pemberatan sanksi terkait tindak pidana korupsi sangat didukung oleh masyarakat seperti apa yang disampaikan oleh zein selaku anggota *Malang Corruption Watch*,

“ Korupsi itu kan kejahatan yang tidak manusiawi, kalau hukumnya sedikit pelakunya ga bakal kapok mas, yang ditakuti oleh koruptor itu adalah kehabisan harta, kalo lewat perpajakan harta dan kerugian negara bisa dikembalikan kami akan sangat mendukung”.

Dukungan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh saudara zein dapat dijadikan penyemangat lembaga – lembaga yang berwenang untuk terus menegakan hukum yang berlaku untuk para tersangka kasus korupsi.

Dengan pengawasan dari masyarakat dalam menjalankan hukum, pihak yang berwenang harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, seperti yang di sampaikan oleh saudara zein,

“ kami selaku perwakilan masyarakat hanya dapat mengawasi dan membantu mensosialisasikan, jadi pihak yang berwenang terutama KPK dan DJP harus siap mempertanggung jawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat”.

Berkaitan dengan hubungan korupsi dan perpajakan, pada tahun 2016 KPK berhasil menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan DKI Jakarta yang menyeret anggota DPRD DKI Jakarta yaitu M Sanusi, dalam kasus suap RAPERDA REKLAMASI. M Sanusi telah terbukti menerima suap Rp. 2.000.000.000 dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land.

M Sanusi juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang senilai Rp 45.287.833.773. Dalam putusan pengadilan Tipikor tersangka dijatuhi hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp. 250.000.000 subsidi 2 bulan kurungan. Dari 10 aset

tersangka yang disidangkan terdapat 3 aset yang bernilai Rp. 20.000.000 yang dikembalikan atau tidak dilakukan penyitaan.

Dalam persidangan jaksa memanfaatkan instrumen perpajakan berupa SPT dan saksi yang merupakan Kakanwil KPP Jakarta Utara. Sebagai alat pembuktian bahwa harta yang dimiliki sanusi di luar dari laporan SPT merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

E. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini ingin menjelaskan mengenai peran perpajakan dalam kasus tindak pidana korupsi dalam upaya mengembalikan kerugian negara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di samping itu penelitian ini juga berusaha menjelaskan alur mekanisme penggunaan undang – undang perpajakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap undang – undang perpajakan.

1. Perlakuan pajak terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Di Indonesia terdapat dua jenis penerimaan negara yaitu penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. dalam hal tersebut jelas diketahui bahwa pajak merupakan hal yang diistimewakan dalam kehidupan bernegara karena diberikan tempat khusus sebagai satu dari dua jenis penerimaan negara yang berperan sebagai penopang pembangunan infrastruktur.

Setiap warga negara berkewajiban untuk memberikan kontribusi pendapatanya kepada negara sebagai bentuk kepatuhan menjalankan undang-undang perpajakan. Negara menghimpun pajak dengan maksud dan

tujuan untuk keberlangsungan jalanya pemerintahan baik pembangunan infrastruktur maupun pembelanjaan aparatur negara. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang KUP Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak yang berhasil dihimpun akan dikembalikan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pengembangan infrastruktur yang tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara individu. Itu lah alasan mengapa pentingnya kepatuhan pajak warga negara untuk pemerataan pembangunan diberbagai aspek.

Negara tidak secara paksa memungut pajak kepada seluruh warga negara, melainkan dengan syarat dan ketentuan yang dapat mengkategorikan bahwa seseorang atau sesuatu dapat dikenakan pajak. yang menjadi syarat dan ketentuan tersebut diantaranya :

- a. Adanya tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan atau konsumsi
- b. Telah melebihi batas pendapatan tidak kena pajak
- c. Merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak
- d. Tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang penghasilan pasal 4 dan pasal 5 tentang objek pajak.

Apabila seorang wajib pajak telah memenuhi syarat tersebut maka negara berhak memberikan kewajiban kepada yang bersangkutan untuk patuh melaporkan kewajiban perpajakan guna menghindari konsekuensi hukuman denda bahkan pidana dibidang perpajakan.

Kementrian Keuangan berusaha mengurangi peluang Korupsi di bidang perpajakan dengan menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk melaporkan laporan harta kekayaan pegawai negeri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan untuk wajib pajak kemenkeu menghimbau untuk tidak berusaha melakukan penyuapan terkait sengketa perpajakan. namun terkadang masih saja kerap terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pajak. Hal ini akan berdampak kepada semangat lembaga untuk menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak yang membayarkan pajak secara patuh dan teratur, tentu memberikan penilaian negatif kepada pihak fiskus yang telah dipercaya masyarakat untuk menghimpun dana yang mereka setorkan kepada negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi selalu berusaha memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan melakukan *asset tracking* dan penyitaan harta kekayaan tersangka. Jumlah dana yang terhimpun dari hasil pengembalian dan pelelangan akan di masukan ke dalam kas negara. Menurut pantauan Indonesia Corruption Watch selama tahun 2015 jumlah Korupsi di Indonesia sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan dengan total potensi kerugian negara sebesar RP 3,1 T dan suap sebesar RP 450,5 Miliar . dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 2. Jumlah kasus korupsi yang teridentifikasi pada Tahun 2015

No	Jenis Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian negara
1	Penyalahgunaan anggaran	134	Rp. 803,3 miliar
2	Penggelapan / mark up	107	Rp. 412,4 miliar
3	Penyalahgunaan Wewenang	102	Rp. 991,8 miliar
4	Laporan Fiktif	29	Rp. 122.1 miliar
	Total	372	Rp. 2.328,6 miliar

Sumber : *Indonesia Corruption watch*

Mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan dari kasus pidana korupsi, harus ada tindakan tegas dari lembaga berwenang untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal. Kerugian penerimaan pajak juga dapat terlihat dari 29 kasus laporan fiktif, dapat dipastikan laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap pajak penghasilan perusahaan atau orang pribadi yang bersangkutan, hal tersebut dapat diketuai dari laporan keuangan yang tidak ditulis dengan keadaan sebenarnya dan kita ketahui SPT harus menyesuaikan dengan laporan keuangan perusahaan. Terdapat pelanggaran undang-undang perpajakan dalam poin tersebut. Apabila dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait surat pemberitahuan yang bersangkutan dan ditemukan kesengajaan memanipulasi surat pemberitahuan, maka direktorat jenderal pajak berhak memberikan sanksi.

Undang- undang perpajakan bersifat khusus, walaupun berkaitan dengan kasus pidana lain, undang - undang perpajakan hanya dapat mengatur hal- hal yang berkaitan dengan perpajakan. Mekanisme

penggunaan undang-undang perpajakan dalam kasus tipikor adalah sebagai berikut :

- a. KPK melakukan Penyelidikan terhadap terduga pelaku korupsi
- b. Apabila ditemukan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran perpajakan berkaitan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) huruf f meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka kepada instansi terkait, komisi pemberantasan korupsi wajib menyertakan dalam berita acara penyelidikan.
- c. KPK berhak melimpahkan berkas perkara apabila di nilai perkara yang di selidiki di indikasikan termasuk tindak pidana perpajakan
- d. Sesuai dengan pasal 43 a ayat 1 undang- undang nomor 28 tahun 2002 tentang ketentuan umum perpajakan yang berbunyi direktorat jendral perpajakan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan direktorat jendral perpajakan.
- e. Setelah dilakukan penyelidikan dan tersangka terbukti melakukan pelanggaran dibidang perpajakan DJP berhak melakukan penuntutan melalui Kejaksaan Agung.

Menurut teori relatif atau tujuan bahwa pembedaan bukan hanya untuk menghukum kejahatan yang telah dilakukan tetapi juga untuk :

1. mencegah orang lain melakukan pidana pajak

2. perbaikan wajib pajak agar dikemudian hari tidak melakukan tindakan serupa
3. melindungi para pembayar pajak lainnya yang patuh dan yang belum patuh agar melakukan kewajiban pajak semestinya sehingga penerimaan pajak dapat terus tercapai (doeltheorien; Umar Said, 2009, Pengantar Hukum Indonesia)

Dalam pernyataan tersebut sangat jelas bahwa tujuan utama undang-undang perpajakan bukan semata-mata untuk menghukum orang yang bersalah dibidang perpajakan, namun lebih mengutamakan pencapaian penerimaan pajak setiap tahunnya dengan cara menegakkan undang-undang yang berlaku. Dengan diterapkannya undang-undang perpajakan secara tegas tentu akan memberikan efek jera kepada pelaku dan peringatan kepada wajib pajak lainnya agar bersikap patuh terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan mereka.

Harta kekayaan seharusnya dilaporkan secara benar dan sesuai dengan apa yang dimiliki wajib pajak, namun terkadang wajib pajak berusaha menyembunyikan kekayaan tersebut dengan berbagai alasan, mulai dari murni penghindaran pajak, mengurangi beban pajak, ketidak telitian hingga menyembunyikan harta hasil korupsi yang menyebabkan kerugian negara minimal kerugian pajak akibat dari harta yang tidak dilaporkan oleh tersangka.

Dalam uraian di atas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tindak pidana korupsi dan perpajakan. Telah disebutkan dalam undang-

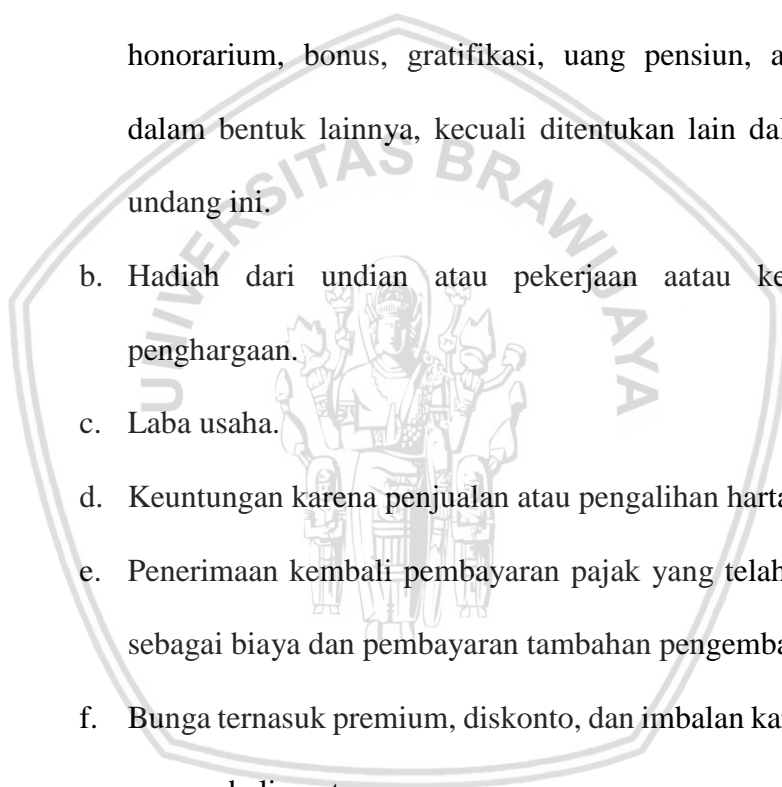
undang nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf f tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa KPK berhak meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka kepada instansi terkait. Instansi yang berwenang dalam data perpajakan adalah Direktorat Jendral Pajak. salah satu data perpajakan yang sangat diperlukan adalah surat pemberitahuan.

Sudah dijelaskan dalam undang-undang KUP bahwa surat pemberitahuan memuat laporan kekayaan dan kepemilikan harta benda wajib pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan, dalam prakteknya surat pemberitahuan tahunan (SPT) dapat dicocokkan dengan Laporan Hasil Kekayaan Negara Pegawai Negeri (LHKPN) apakah ada perubahan yang mencolok dari LHKPN sebelumnya yang dapat diindikasikan wajib pajak memiliki harta dari tindak pidana kasus korupsi yang sedang diselidiki. Ini merupakan salah satu pintu masuk agar dapat dilakukannya pemeriksaan perpajakan. Apabila ditemukan pelanggaran perpajakan dalam pemeriksaan surat pemberitahuan maka Direktorat Jendral Pajak berhak melakukan penindakan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut persepsi perpajakan uang hasil tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai penghasilan, karena sudah sesuai dengan unsur-unsur yang telah disebutkan di atas tercantum pada undang-undang pajak penghasilan dan disebutkan pula yang termasuk jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tentang objek pajak penghasilan yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.



- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan uang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atas pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan,
- s. Surplus Bank Indonesia.

Uraian undang-undang pajak penghasilan di atas memuat beberapa poin yang termasuk menjadi sasaran dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut berhubungan atau sesuai dengan definisi yang tercantum dalam undang-undang. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Daud Suranto mengenai definisi dan kriteria dari penghasilan yang dapat dijadikan objek pajak seperti gratifikasi dan pendapatan apapun yang dapat dikategorikan kedalam pendapatan lain-lain

Pada Undang-undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 huruf a dalam uraiannya disebutkan beberapa unsur yang sering menjadi dakwaan tersangka korupsi yaitu gratifikasi dan bonus. Banyak tersangka korupsi terbukti menerima gratifikasi terkait proyek atau permintaan tertentu yang diajukan pemberi gratifikasi untuk memudahkan proses birokrasi. Gratifikasi sendiri bukan berasal dari uang negara melainkan berasal dari harta si pemberi janji bisa berupa uang, fasilitas dan jasa, karena jika uang hasil korupsi merupakan uang negara otomatis uang tersebut harus dikembalikan sepenuhnya untuk menutupi kerugian yang dialami negara. Namun dalam kasus suap, negara belum tentu dirugikan secara finansial. Menurut persepsi perpajakan gratifikasi sudah termasuk kedalam objek pajak penghasilan karena pajak tidak mengenal baik atau buruk sumbernya.

Dalam pasal tersebut juga disebutkan tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Dalam poin ini dapat dikaitkan dengan harta tersangka korupsi yang belum dimasukkan kedalam SPT dan yang belum disita secara keseluruhan oleh pengadilan dan sesuai dengan bunyi atau definisi penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan tersangka dalam nama dan bentuk apapun maka, harta-harta yang masih belum dilakukan penyitaan dan belum dilaporkan kedalam SPT akan dikenakan sanksi atau denda terkait ketidakjujuran dalam pelaporan SPT.

Melalui pasal tersebut seharusnya Direktorat Jendral Pajak juga memiliki hak dan wewenang untuk melakukan tindakan lanjutan terhadap

unsur-unsur yang berkaitan dengan perpajakan. Namun dalam proses nya peneliti tidak menemukan satupun kasus tindak pidana korupsi yang sebenarnya bersinggungan dengan kasus perpajakan diputus menggunakan undang-undang perpajakan, melainkan hanya sebatas pemeriksaan barang bukti dan saksi seperti yang terjadi pada kasus suap Raperda Reklaasi teluk Jakarta dengan tersangka M Sanusi selaku anggota DPRD DKI Jakarta.

Jika menurut definisi perpajakan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan penindakan perlakuan perpajakan, maka harus dilakukan pembuktian bahwa harta tersebut benar dimiliki oleh tersangka. Bapak Budhi Sarumpaet juga menuturkan hal yang serupa mengenai keharusan melakukan pembuktian terhadap harta yang diduga belum dilaporkan atau belum dikenakan pajak. fungsinya untuk mengetahui kejelasan asal muasal harta yang dimiliki apabila bersangkutan dengan kasus yang sedang di sidik maka wajib dilakukan penyitaan.

Proses pembuktian ini sejalan dengan asas pembuktian terbalik dimana pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap harta-harta yang diduga berasal dari kasus korupsi akan diuji kebenarannya apakah benar merupakan harta yang dimiliki tersangka yang diperoleh secara legal atau merupakan harta pemberian dari orang lain berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang sedang disidangkan.

Kebersinggungan rezim hukum undang-undang perpajakan dan undang-undang tindak pidana korupsi sering terjadi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Seperti yang disampaikan bapak Budhi

Sarumpaet bahwa kebersinggungan hukum biasa terjadi apabila seperti dalam contoh penyalahgunaan wewenang pegawai direktorat jendral pajak dalam penanganan kasus keberatan yang menyebabkan kerugian negara, akibat rekomendasi penerimaan keberatan wajib pajak yang dalam prosesnya diduga ada unsur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang atau suap walaupun secara administrasi perpajakan dinyatakan telah sesuai dengan prosedur. Maka dalam kasus tersebut KPK memiliki wewenang untuk menindak pegawai pajak dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dan perpajakan termasuk dalam pidana khusus, keduanya memiliki undang-undang yang mengatur bidang masing-masing. Sejalan dengan pernyataan bapak Budhi Sarumpaet tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus maka undang-undang yang digunakan dalam penuntutan tersangka adalah undang-undang tipikor, dalam menentukan hukuman JPU mempertimbangkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bagaimana niat dan peran terdakwa dapat meringankan atau bahkan memberatkan hukuman. Jika undang-undang tindak pidana korupsi lebih mengedepankan hukuman pidana kepada tersangka, lain halnya dengan undang-undang perpajakan yang lebih mengutamakan aspek administrasi dan kepatuhan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Filosofi utama hukum perpajakan untuk menegakkan kepatuhan, bukan untuk mempidanakan yang merupakan tugas polisi dan jaksa atau Mahkamah Agung, jika terdapat penyidikan pajak pada saat

penuntutan maka akan di perkarakan ke pengadilan dan jaksa yang akan melakukan penuntutan. Tetapi apabila ada unsur perdata yang keputusannya adalah surat ketetapan maka akan dilakukan tindakan penagihan.

Kerjasama antara KPK dan DJP sebenarnya dapat dilakukan atas dasar penandatanganan nota kesepahaman Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 004/KPK-Menkeu/II/2005 pada tanggal 23 februari tahun 2005. Nota kesepahaman tersebut memuat berbagai bentuk kerja sama kedua lembaga dan yang paling berperan dalam penindakan kasus korupsi adalah tukar menukar data dan penunjukan pegawai penghubung. Hal tersebut sangat menopang kinerja kedua lembaga apabila dilakukan secara konsisten, namun sayangnya hal tersebut hanya sebatas permintaan data perpajakan kepada DJP dan tidak dilanjutkan untuk ke tahap pemeriksaan pajak karena sejauh ini belum ditemukan perlakuan pajak yang seperti pemeriksaan bukti permulaan pada kasus tindak pidana korupsi.

Harta hasil pengembalian kerugian negara akan masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan bukan pajak. lalu bagaimana jika tidak seratus persen kerugian negara dapat dikembalikan, peneliti berusaha menempatkan undang-undang perpajakan sebagai upaya lain untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara, karena terdapat beberapa alasan undang-undang perpajakan dapat melakukan penindakan sebagai upaya hukum tambahan dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi. Jika terdapat kekayaan bersih yang tersisa dan belum dilaporkan kedalam surat

pemberitahuan, maka pihak direktorat jendral pajak berhak mengeluarkan surat tagihan pajak kepada tersangka melalui proses pemeriksaan. Diluar adanya kekayaan bersih yang masih tersisa apabila ditemukan pula pelanggaran dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak bahwa yang bersangkutan tidak mengisi surat pemberitahuan dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak mencantumkan penghasilan serta aset kekayaan lain, maka direktorat jendral pajak juga berhak melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan diluar kasus persidangan tindak pidana korupsi. Karena menurut pasal 76 kitab undang-undang hukum pidana bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim. Jika tersangka dinyatakan bebas dalam sebuah kasus korupsi, namun terbukti memiliki harta kekayaan yang belum dilaporkan kedalam SPT pajak, maka undang-udnang perpajakan dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum dengan tujuan mengembalikan kerugian negara.

Perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi dapat dilakukan atas permintaan khusus dari KPK sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) huruf f tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka kepada instansi terkait. Instansi yang berwenang dalam bidang perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak, DJP wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan. Sedangkan dari DJP sendiri dengan dasar pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Direktorat Jendral Perpajakan Berdasarkan data, informasi, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua peraturan tersebut adalah dasar yang cukup untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap temuan pelanggaran perpajakan dalam tindak pidana korupsi. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur pemeriksaan perpajakan secara menyeluruh terhadap kasus tindak pidana korupsi membuat kerjasama kedua lembaga sedikit terhambat karena tidak berjalan secara konsisten.

Direktorat Jenderal Pajak secara langsung melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam kasus tersebut karena berkaitan dengan sebuah kasus pidana sejalan dengan yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan NOMOR 82/PMK.03/2011 tentang ketentuan dan tata cara pemeriksaan, pasal 27 ayat 1 yaitu pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu juga diperkuat oleh undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 43 a ayat 1 yang berbunyi direktorat jenderal perpajakan berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Berdasarkan data dan informasi yang dilimpahkan dari KPK apabila terdapat pelanggaran perpajakan dalam sebuah kasus korupsi, dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap DJP berhak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi hanya sebatas instrumen penyelidikan melalui SPT. Undang-undang perpajakan sendiri mengutamakan pada optimalisasi penerimaan pajak negara sedangkan undang-undang tipikor mengutamakan unsur pidana sebagai pemberian efek jera kepada tersangka. Kedua undang-undang seharusnya dapat dikombinasikan menjadi pasal berlapis dalam penuntutan sebuah kasus yang melanggar unsur keduanya. Menghukum terdakwa dan mendapatkan kembali kerugian negara yang diakibatkan oleh penggelapan penghasilan beserta dendanya, sesuai undang-undang KUP nomor 16 Tahun 2009 pasal 39 huruf i yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Undang-undang perpajakan yang juga terkadang bersinggungan dengan kasus tindak pidana korupsi adalah pelanggaran penyampaian SPT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan wajib pajak atau tersangka korupsi yang tidak menyampaikan harta dan penghasilan yang didapat dari hasil suap atau gratifikasi kedalam SPT, melanggar undang-undang KUP nomor 16 Tahun 2009 pasal 38 huruf a dan b, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan

perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah pertama kali didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang atau paling banyak dua kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar, dipidana paling sedikit 3 bulan atau paling banyak 1 tahun.

Maraknya kasus korupsi juga dapat dikatakan sebagai salah satu resiko dari sistem pemungutan pajak self assessment yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk mengurus laporan perpajakannya sendiri. Minim nya pengawasan terhadap wajib pajak membuat wajib pajak dapat menyembunyikan/ menempatkan harta didalam SPT sesuai dengan keinginan wajib pajak.

Sanksi-sanksi pidana dan denda perpajakan sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut, sayang kurangnya ketegasan juga terlihat dari undang-undang KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 41 tentang pelanggaran perpajakan yang dilakukan pegawai pajak yang berbunyi pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak . Rp.50.000.000. Sedangkan pada pasal 43A ayat 3 disebutkan apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi pegawai pajak yang tersangkut wajib diproses dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Menurut kedua pasal tersebut pegawai pajak sama-sama melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, namun dalam prakteknya undang-undang tindak pidana

korupsi lebih dikedepankan seperti yang terjadi pada kasus suap Raperda Reklamasi.

Terjadi tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan oleh M Sanusi selaku anggota DPRD DKI Jakarta, SPT yang bersangkutan diperiksa kebenarannya. Jaksa Penuntut umum memanggil kepala kanwil jakarta utara yaitu Pontas Pane sebagai saksi atas SPT Sanusi. Dalam kesaksiannya terbukti banyak penghasilan dan harta yang tidak dicantumkan kedalam SPT artinya telah terjadi pelanggaran pengisian SPT oleh saudara Sanusi, belum ada tindak lanjut dari instansi DJP terkait adanya pelanggaran tersebut. Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Bustanul Siregar dalam DDTC news (Dani Darusalam Tax Center) mengatakan hal serupa “kehadiran pegawai pajak untuk mengungkapkan isi SPT dalam persidangan relatif jarang, bayangkan jika para jaksa korupsi memaksimalkan data dan informasi yang bersumber dari SPT guna mempertajam konstruksi dakwaan. Bagi DJP sendiri terungkapnya ketidak benaran SPT-SPT para koruptor yang diperiksa dipengadilan akan menjadi sumber penerimaan baru”.

2. Mekanisme perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi

Terdapat 3 tahapan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi :

a. Penyelidikan

Menurut pasal 12 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi berwenang :

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- 2) Memerintahkan kepada instansi terkait untuk mencegah seseorang keluar negeri
- 3) Meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. memerintahkan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diduga dari hasil korupsi tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang terkait
- 4) Meminta kepada atasan tersangka untuk memberhentikan sementara dari jabatan
- 5) Meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka kepada instansi yang terkait.
- 6) Menghentikan suatu transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan licensi serta koneksi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
- 7) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau Instansi penegak hukum negara lain

- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi penegak hukum terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kegiatan penyelidikan adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan. Penyelidikan sendiri berawal dari adanya temuan informasi atau keterangan berupa lisan, tulisan dan data digital yang dapat dijadikan keterangan atau alasan dilakukannya sebuah penyelidikan. Seperti kita lihat pada poin ke 5, meminta data perpajakan kepada instansi terkait. Instansi terkait yang dimaksud adalah DJP yang diwakili oleh Kantor Wilayah tempat dimana tersangka korupsi terdaftar. Sedangkan data perpajakan yang dimaksud adalah SPT wajib pajak yang bersangkutan dengan kasus yang sedang diperiksa.

Mulai dalam tahap ini perpajakan dapat berperan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. SPT dapat dijadikan sumber keterangan dan alat bukti untuk mengusut harta dan penghasilan yang berkaitan dengan tindak pidana. Hasil keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh jaksa penuntut umum maupun hakim dalam menentukan hukuman kepada tersangka terkait peran dalam kasus tersebut serta dampak kerugian terhadap penerimaan negara.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum atau penyidik dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Yang berhak menjadi penyidik menurut KUHAP pasal 1 ayat 1 juncto 6 adalah :

- 1) Polisi
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 3) Jaksa untuk kasus tipikor (menurut undang-undang lain)

Penyidikan adalah upaya mengumpulkan dan meneiliti keterangan yang didapat dalam tahap penyelidikan, kerjasama antar penyidik kedua lembaga dapat diwujudkan dengan peran dan kemampuan masing-masing. PPNS dari lembaga DJP dapat difungsikan untuk memeriksa dan memastikan data dan informasi perpajakan terkait kasus yang sedang di selidiki

c. Penuntutan

Menurut KUHAP pasal 1 ayat 7 menjelaskan pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan perminataan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan

Seperti pada kasus Muhammad Sanusi, Jaksa Penuntut Umum dapat memanggil kepala kantor wilayah dimana WP terdaftar untuk memberikan keterangan kesaksian terkait SPT atas nama pihak-pihak

yang bersangkutan untuk memberikan informasi sebagai pertimbangan konstruksi tuntutan yang akan dijatuhkan kepada tersangka.

Berdasarkan proses penyidikan jaksa umum berhak menentukan tuntutan kejahatan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan undang-undang yang telah dilanggar oleh tersangka yang akan digunakan sebagai dasar oleh jaksa penuntut umum untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka dimuka persidangan. Bila terbukti terjadi pelanggaran perpajakan penuntut umum berhak memberikan pasal berlapis untuk tersangka baik di bidang korupsi maupun perpajakan untuk memberikan efek jera kepada tersangka korupsi dan masyarakat.

2. Potensi Peningkatan Penerimaan Perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assesment* adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target penerimaan perpajakan setiap tahun. Peran serta masyarakat untuk melaporkan perpajakan akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak Indonesia. Pada tahun 2016 hingga bulan oktober DJP berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp.870,954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp1.355,203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 768,691 triliun

Tabel 3. Realisasi penerimaan PPH Non-Migas tahun 2015 dan 2016

Tahun	Target penerimaan	Realisasi penerimaan	Presentase
2015	Rp 1.294,258 triliun	Rp 768,691 triliun	59,41%
2016	Rp1.355,203 triliun	Rp.870,954 triliun	64,27%

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan hasil pencapaian target penerimaan tahun 2016 masih terdapat potensi sebesar 36,73% yang dapat dimaksimalkan. Penerimaan Non-PPH Migas Rp.842,979 triliun tersebut terdiri atas penerimaan total PPH Non Migas sebesar Rp.513,266 triliun, penerimaan total PPN dan PPn BM senilai Rp.307,268 triliun, penerimaan PBB sebesar Rp.16,349 triliun dan penerimaan Pajak Lainnya senilai Rp.6,095 triliun.

Berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi penambahan penghasilan kepada si penerima. Menurut perpajakan, maka dapat dikenai kewajiban perpajakan terhadap penghasilan yang diterima oleh pihak yang bersangkutan dan apabila tidak tercantum dalam SPT sudah pasti melanggar undang-undang ketentuan umum perpajakan pasal 39 tentang kesengajaan melaporkan SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Untuk menghitung potensi penerimaan perpajakan atas perlakuan pajak terhadap kasus tindak pidana korupsi, penulis menggunakan asumsi perhitungan terhadap pelanggaran pajak kasus M. Sanusi selaku anggota

DPRD DKI Jakarta dalam kasus suap Raperda Reklamasi teluk Jakarta, karena hanya kasus tersebut yang menggunakan instrumen perpajakan yaitu barang bukti dan saksi dalam fakta persidangan, tersagka terbukti menyembunyikan sebagian harta dan penghasilan dengan sengaja tidak menyampaikan ke dalam SPT yang melanggar pasal 39 undang – undang Tata cara dan Ketentuan Umum Perpajakan.

Berdasarkan keterangan Pontas Pane selaku Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, Nilai SPT yang di sampaikan Sanusi sebesar Rp. 2.443.255.662 tercatat sejak tahun 2009 hingga 2015. Sanusi tidak menyampaikan Harta kekayaan lain nya berupa Aset kendaraan, Rumah dan Apartemen dengan total miliar Rupiah. Peneliti hanya mempertimbangkan jumlah penghasilan kena pajak. Sedangkan aset aset yang bersangkutan merupakan wewenang Kejaksaan dan KPK untuk dilakukan penyitaan. Dengan sanksi perhitungan yang terdapat pada undang – undang tata cara ketentuan umum perpajakan Pasal 39 ayat 1 M. Sanusi merupakan keluarga dengan status k2 yaitu 1 orang istri dan 2 orang anak, maka Pendapatan tidak kena pajak (PTKP) nya sebesar Rp. 67.500.000. dengan menggunakan perhitungan tarif pasal 17 maka pajak terhutang nya adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto	Rp. 2.443.255.000
Pengurang (-)	
biaya Jabatan	Rp. 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp. 2.400.000
PTKP	Rp. 67.500.000
Total Pengurang	Rp. 75.900.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 2.367.355.000

Perhitungan PPh Tarif Pasal 17

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

15%	x	Rp. 250.000.000	=	Rp. 37.500.000
25%	x	Rp.500.000.000	=	Rp. 125.000.000
30%	x	Rp. 1.567.355.000	=	Rp. 470.206.500
Pajak Penghasilan			=	Rp. 635.206.500

Perhitungan sanksi bunga 2% x 24 bulan x pajak kurang bayar

Penghasilan yang belum di laporkan dan belum disita = Rp

20.000.000.000 (semua harta yang terungkap di nilaikan dengan uang)

Maka perhitungan sanksi nya sesuai pasal 13 UU KUP , Surat Ketetapan

Kurang Bayar diterbitkan setelah 5 tahun karena ditemukan unsur pidana.

Penghasilan Bruto	Rp. 20.000.000.000
Pengurang (-)	
biaya Jabatan	Rp. 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp. 2.400.000
PTKP	Rp. 67.500.000
Total Pengurang	Rp. 75.900.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 19.924.100.000

Maka PPh tarif 17

Perhitungan PPh Tarif Pasal 17				
5%	x	Rp.50.000.000	=	Rp.2.500.000
15%	x	Rp.250.000.000	=	Rp.37.500.000
25%	x	Rp.500.000.000	=	Rp.125.000.000
30%	x	Rp.19.124.1000.000	=	Rp.5.737.230.000
Pajak Penghasilan			=	Rp.5.902.230.000
Telah disetor			=	Rp.635.206.500
Maka pajak kurang bayar			=	Rp.267.023.500
Sanksi 48% x pajak kurang bayar			=	Rp.2.528.171.280
Total pajak kurang bayar			=	Rp.7.795.194.780

Dengan Perhitungan tersebut pajak M Sanusi adalah Rp. 635.206.500 karena terjadi pelanggaran dengan ditemukanya harta lain yang tidak dilaporkan sebesar Rp. 20.000.000.000, maka pajak terhutang M Sanusi mengalami Kenaikan Sebesar 48% jumlah Pajak

kurang bayar menjadi Rp. 7.795.194.780 sesuai pasal 13 ayat 5 UU KUP.

Dengan bertambahnya jumlah pajak terhutang orang pribadi maka akan memberikan dampak peningkatan terhadap penerimaan pajak.

Yaitu :

$$\frac{\text{selisih kenaikan pajak terhutang}}{\text{Realisasi target penerimaan}} \times 100\% = \text{presentase kenaikan}$$

$$\frac{\text{Rp.7.795.194.780}}{\text{Rp.870.954.000.000.000}} \times 100\% = 0.000895 \%$$

Potensi peningkatan perlakuan pajak terhadap kasus tindak pidana korupsi M sanusi adalah 0,000895 % dari total target penerimaan pajak. Jika instrumen perpajakan dipergunakan secara konsisten dalam penindakan kasus korupsi bukan tidak mungkin akan mengalami kenaikan.

Demikian asumsi perhitungan penulis jika perlakuan pajak digunakan sebagai upaya penindakan terhadap harta kasus tipikor yang belum disita pengadilan. Kenyataan di lapangan pada kasus tersebut instrumen perpajakan hanya digunakan sebagai alat bukti dan tidak dilanjutkan ketahap penyelidikan pajak untuk menegakan undang-undang perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan mengembalikan kerugian negara melalui perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan tata acara penagihan sesuai dengan UU KUP. Namun dalam penelitian ini, perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi hanya sebatas penggunaan SPT sebagai barang bukti dan pemberian keterangan saksi ahli di bidang perpajakan, belum ada penindakan secara hukum pajak terhadap pelanggaran perpajakan yang ditemukan dalam fakta persidangan.
2. Perlakuan pajak yang dilakukan DJP sejauh ini hanya sebatas pertukaran data berupa SPT yang diserahkan kepada penyidik KPK namun belum ada tindakan lanjutan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dipersidangan tindak pidana korupsi. Implementasi penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi hambatan, Sehingga perlakuan pajak atas kasus tindak pidana korupsi belum berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kerjasama kedua lembaga harus lebih ditingkatkan dalam penindakan kasus korupsi. UU KUP sudah cukup jelas menjabarkan terkait peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran perpajakan, melalui dasar tersebut seharusnya DJP dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran pajak yang terungkap di persidangan tipikor.
2. Perlunya kepastian hukum yang mengatur secara khusus perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi dan konsistensi penegakan hukum DJP dalam menangani data dan informasi mengenai pelanggaran perpajakan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan tentang perpajakan untuk kepentingan perpajakan. DJP di minta untuk berperan aktif dalam memantau kasus tipikor yang berkaitan dengan unsur perpajakan guna menjaga nama baik yang berimbas pada kepercayaan dari masyarakat. Karena bukan tidak mungkin perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi jika dilakukan secara konsisten akan meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.
- Boediono. 2011. *Ekonomi Makro*, Yogyakarta :BPFE
- Detik. 2014. “PT. Asian Agri Lunasi Denda 2,5T” diakses pada tanggal 18 September 2016 dari <https://news.detik.com/berita/2698916/kejagung-pt-asian-agri-lunasi-denda-rp-25-triliun>
- Djaja, Ermasjah. 2010. *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dawson, Chaterine, 2010. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hastonoputra, Willi. 2014. *Penegendalian Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap Rasio Penerimaan Pajak*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Indonesia Corruption Watch .2010. “Triliunan Rupiah Hasil Pajak Berpotensi Hilang”, diakses pada tanggal 18 Januari 2017 dari <http://www.antikorupsi.org/id/news/triliunan-rupiah-hasil-pajak-berpotensi-hilang>
- Indonesia Corruption Watch. 2016. *Kinerja Penanganan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2016*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Isra. 2006. *Analisis Perlakuan Pajak atas Transaksi Murabahah*. Jakarta : Universitas Indonesia

- Lesmana, Rafika. 2014. *Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup Sebagai Upaya Baru Penegakan Hukum Perpajakan*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010
- _____, *Perpajakan* edisi Revisi 2011, C.V Andi Offset, Yogyakarta 2011
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Netherland Income Tax act 2001
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Riduan, 2009. *Metode dan Teknik menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Soebakir, Moch. 1999. *Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta : Berita Pajak
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sultoni. 2013. “ Memiskinkan Koruptor Melalui UU Pajak”, diakses pada tanggal 10 juli 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/memiskinkan-koruptor-melalui-uu-pajak>
- Syamsudin, Usman. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Timbul dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Raih Asa Sukses.

Transperancy International.2014. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia”, diakses
Pada tanggal 15 September 2016 dari
<http://www.TransperancyInternational.co.id>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan
perpajakan

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi
Aksara.

Velayati, Rizkika. 2012. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan*

Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan tunggakan Pajak. Malang : Universitas Brawijaya.

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.



Pedoman wawancara

Narasumber : Bapak Daud Suranto selaku kepala seksi manajemen proses dan penjaminan kualitas pengembangan Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia ?

Jawab : “ Penanganan kasus korupsi di Indonesia menurut saya belum banyak didukung oleh semua kalangan masyarakat Karena menurut saya kasus korupsi di Indonesia banyak berkaitan dengan unsur unsur politis, kadang membuat orang takut untuk turut mengawasi , belum lagi oknum aparat penegak hukum yang masih menerima suap untuk membantu atau meringankan hukuman tersangka korupsi di Indonesia, termasuk korupsi di bidang perpajakan seperti contohnya itu kasus gayus tambunan, masih inget banget seberapa heboh kasus gayus itu. Dampaknya adalah citra DJP yang memburuk akibat perilaku oknum pegawai pajak nakal. Kerugiannya sangat besar lho. Darisitu bias kita lihat oknum oknum yang bermain dalam kasus sampai si gayus bias keluar masuk penjara untuk plesiran itu bukti bahwa penyelesaian kasus korupsi di negara kita belum maksimal.”

2. Apakah hukuman bagi tersangka korupsi sudah cukup adil ?

Jawab : “kalau bicara hukuman adil atau tidak saya tidak dapat menyimpulkan tapi selama semua koruptor itu di tangkap dan di jatuhkan hukuman penjara ya adil adil saja, Karena yang menentukan lama atau tidaknya hukuman kan tergantung dari jaksa penuntut umum apa yang didakwakan kepada tersangka.”

3. Apakah perlu diberikan hukuman lain berupa pengambilan kembali harta yang berasal dari korupsi ?

Jawab “sebagai fiscus saya sih setuju, Karena para pelaku korupsi itu sangat merugikan negara. Dan kaitanya dengan pekerjaan saya sebagai fisku adalah kita berusaha memaksimalkan kinerja untuk menghimpun penerimaan negara melalui pajak semaksimal mungkin ini sngat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh koruptor tentu kita berharap semua harta yang telah di nikmati dapat dikembalikan menjadi hak negara, Karena sbesar apapun penerimaan negara akan sangat bermanfaat.”

4. Tuntutan atau undang – undang perpajakan apa saja yang dapat gunakan untuk mengambil kembali kerugian negara tesebut ?

Jawab : “dalam perspektif perpajakan korupsi mungkin bisa saja dikaitkan dengan UU PPH, karena pelaku korupsi selalu mendapat tambahan kemampuan ekonomis yang dapat ia gunakan sebagai konsumsi atau disimpan seperti pengertian penghasilan menurut uu PPH pasal 4. Jika kita bias membuktikan kebenaran atau sumber harta yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPK, dan apabila kita mendapat informasi dari masyarakat dan pihak berwenang maka DJP berhak melakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada tersangka Karena terlibat tindak pidana korupsi yang merugikan penerimaan paak akibat tidak melaporkan atau diduga melaporkan SPT secara tidak Jujur.”

5. Apakah menurut bapak hubungan DJP dengan KPK sudah bersinergi dengan baik ?

Jawab : “kalau bertanya soal hubungan DJP dan KPK apakah sudah berjalan baik, ya kita bekerja sama dalam berbagai hal antara DJP dan KPK sudah memiliki nota kesepahaman tentang kerjasama-kerjasama yang dilakukan guna memberantas tindak pidana korupsi, seperti melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan DJP guna menjaga integritasnya, menjalin tukar menukar data dan informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh KPK, kami mendukung penuh aksi KPK menindak pelaku korupsi walaupun melibatkan pejabat DJP sekalipun kami siap membantu memeriksa dan

menyelidik tiap kasus korupsi yang ada diluar ataupun di dalam DJP itu sendiri,”

6. Bagaimana upaya yang dilakukan dari DJP sendiri untuk mencegah Pegawainya melakukan tindakan Korupsi ? apakah upaya tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?

Jawab : “ upaya upaya yang dilakukan setiap lembaga mungkin berbeda beda ya di DJP sendiri yang pasti untuk mencegah terjadinya korupsi kita rutin melkaukan pelaporan LHKPN kepada KPK yang diwajibkan kepada setiap pegawai DJP mulai dari jabatan terendah hingga para pemimpinnya. Selain itu kita juga rutin melakukan pelatihan anti korupsi untuk menjaga Integritas para karyawan dan terhindar dari kasus tindak pidana korupsi.”

7. Hukuman seperti apa yang menurut bapak dapat memberikan efek jera kepada pada koruptor ?

Jawab : “tergantung tujuan utama nya, kalo menurut saya selaku fiskus mungkin sebaiknya di sita saja harta kekayaan pelaku koruptor agar tidak bisa menikmati setelah keluar dari penjara. Karena saya melihat biarpun tersangka sudah tertangkap mereka masih bisa menikmati harta kekayaan mereka bahkan masih bisa menjabat menjadi elit politik da pejabat pemerintahan, banyak kasus kasus bupati non aktif yang terlibat korupsi tetap dilantik, penggunaan uu peprajakan jika diterapkan secaraberkelanjutan mungkin akan meningkatkan potensi penerimaan negara selain itu juga bisa menjadi sumber pencapaian target tahunan DJP yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap DJP dan KPK itu sendiri.

8. Bagaimana mekanisme perlakuan pajak atas kasus pidana korupsi yang dapat diterapkan ?

Jawab : “Perlakuan pajak nya itu mulai dari surat teguran adapula surat tagihan pajak, itu apabila terbukti dipersidangan tersangka juga melakukan

pelanggaran pajak, selanjutnya di terapkan sama seperti undang-undang perpajakan pada umumnya. Misalnya pelanggaran SPT nya apa tidak melaporkan atau tidak jujur. Bias juga dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Macam macam mas tergantung dari bukti dan fakta persidangan yang terungkap.

9. Apakah kendala yang mungkin dapat menghambat perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi ?

Jawab : “Kendala yang mungkin dapat muncul ya, yang pasti birokrasi hukum Antara perpajakan dan tipikor karena keduanya memiliki aturan masing masing dalam menyikapi sebuah pelanggaran hukum, DJP tidak mungkin melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang sedang menjalani persidangan dan berada di tahanan KPK dong. Tapi DJP berhak menghubungi pihak keluarga atau konsultan pajak yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum.

10. Sejauh ini bagaimana penanganan kasus perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi ?

Jawab : “DJP melakukan tindakan apabila terdapa permintaan atau informasi dari KPK, karena DJP tidak memeiliki wewenang memonitoring keseluruhan kasus tindak pidana korupsi karena belum tentu semua kasus korupsi terdapat pelanggaran pajak. Jadi kalau memang KPK butuh tenaga ahli atau saksi untuk membuktikan kebenaran DJP akan membantu memfasilitasi dokumen dan tenaga ahli, sebelum putusan inkraht DJP tidak dapat melakukan tindakan perpajakan karena banyak juga barang dan harta yang telah di sita KPK yang berkaitan dengan kasus korupsi si tersangka.

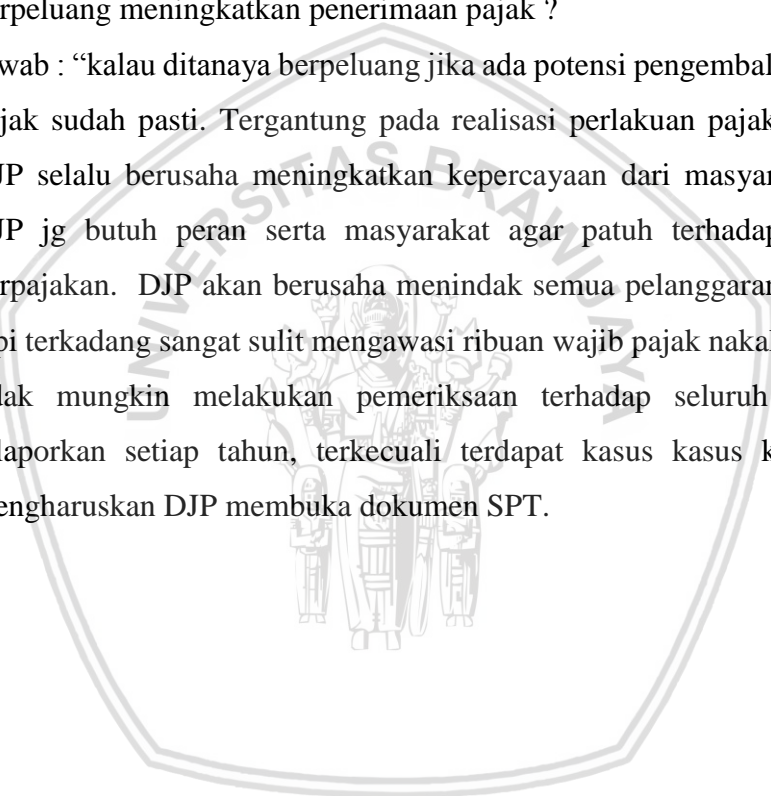
11. Apakah perlakuan pajak atas tipikor dapat direalisasikan dan dilakukan secara konsisten di Indonesia ?

Jawab : “sebenarnya bias bias saja, namun kita butuh payung hukum yang lebih spesifik yang membahas tentang hubungan pelanggaran pajak dan kasus korupsi. Karena sejauh ini yang banyak di bahas adalah pelanggaran

kasus korupsi yang berkaitan dengan penyelewengan pajak dan pegawai pajak yang ditindak dengan Undang-undang tipikor. Walaupun didalam nya jg terdapat kerugian penerimaan perpajakan coba kamu cek di UU KUP disitu terdapat pasal yang menyebutkan apabila terdapat unsur tipikor maka akan digunakan undang – undang KPK atau tindak pidana korupsi.

12. Menurut bapak sendiri, apakah perlakuan pajak atas tindak pidana korupsi berpeluang meningkatkan penerimaan pajak ?

Jawab : “kalau ditanya berpeluang jika ada potensi pengembalian kerugian pajak sudah pasti. Tergantung pada realisasi perlakuan pajak itu sendiri. DJP selalu berusaha meningkatkan kepercayaan dari masyarakat namun DJP jg butuh peran serta masyarakat agar patuh terhadap kewajiban perpajakan. DJP akan berusaha menindak semua pelanggaran perpajakan tapi terkadang sangat sulit mengawasi ribuan wajib pajak nakal karena DJP tidak mungkin melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPT yang dilaporkan setiap tahun, terkecuali terdapat kasus kasus khusus yang mengharuskan DJP membuka dokumen SPT.



Pedoman wawancara

Narasumber : Bapak Budi Sarumpaet

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum KPK

Lokasi : Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Hr. Rasuna Said)

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah menurut bapak peran KPK dalam pemberantasan Korupsi sudah berjalan baik ?

Jawab : Saya selaku JPU yang bertugas menangani kasus korupsi beranggapan kalau peran KPK sudah sangat baik, karena kita berperan sangat Dominan mas aris. Kita melakukan berbagai upaya mulai dari tindakan preventif, pencegahan yah dari sekolah anak – anak SD, Ibu PKK, macem-macem pokoknya lah. Cuma... begini permasalahanya, orang korupsi itu kan menyembunyikan hartanya pintar, kita sita yg ini ternyata masih banyak harta nya. Pake nama supir nama pembantu banyak akal. Makanya kadang masyarakat masih beranggapan kinerja kita masih kurang, belum lagi kalo ada urusan politis kan, rame langsung tekanan dari sana sini mas.

2. Apakah hukuman uang pengganti menurut bapak sudah berjalan efektif mengembalikan kerugian negara ? apa sebabnya ?

Jawab : begini, uang pengganti itu kan memang jumlahnya tidak sebesar uang yang di korupsi tapi memang, kita kan sudah sita harta-harta para koruptor. Nah kebanyakan koruptor lebih rela dipenjara 1 – 2 tahun ketimbang mereka bayar sanksi denda dan lain lain. Tapi ya termasuk efektif lah saya bilangkan memang kita bukan mau mengambil yang bukan dari fakta persidangan. Kita berikan sanksi sesuai jumlah ato besarnya uang Negara yang dia korupsi.

3. Bagaimana dengan kerugian negara akibat kasus korupsi yang belum dapat di ambil kembali dari para koruptor ?

Jawab : tetep kita proses, di KPK itu mas aris ada namanya petugas yang melakukan asset tracing, nah apa itu asset tracing. Jadi, kita tim melakukan penelusuran apa-apa saja harta kepemilikan dari uang korupsi yang dipunya para tersangka. Tujuanya sama ya tetap untuk mengembalikan kerugian Negara akibat prilaku curangnya itu. Tapi memang sulit karena ga semua harta itu jelas status nya apalagi yang berkaitan dengan perbankan, sifatnya masih rahasia. Kita paling blokir rekeningnya dulu sampai selesai proses ssidang.

4. Apakah menurut bapak perlu di berikan hukuman tambahan untuk mengembalikan kerugian tersebut, melalui unsur-unsur perpajakan misalnya ?

Jawab : hukuman tambahan seperti apa misalnya itu, soalnya dalam UU KPK sendiri sudah jelas kan pasal-pasal ada keterangannya. Kalo perpajakan sih tergantung. Karena kan undang-undang kpk dan djp itu beberapa ada yg ersinggungan. Contoh dia punya kendaraan punya tanah sudah dipajaki tapi itu dari hasil korupsi. Kalo menurut uu pajak kan sah sah saja selama dia membayar pajak tetapi di uu KPK tetap harus di sita. Begitu yang dinamakan kebersinggungan rezim Hukum

5. Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan untuk melibatkan undang-undang perpajakan dalam penanganan kasus TIPIKOR ?

Jawab : kalau penggunaan UU pajak yang belum sih mas, tapi kalau pertukaran informasi dan data bias. Kita sering kok dating ke kantor DJP minta berkas berkas SPT terduga korupsi. Kita panggil pegawai pajak kita minta bantuan lihat isi SPT nya bagaimana bener ga, cocok ga. Ya yang pasti kita ajukan surat permohonan dulu ke DJP.

6. Bagaimana jika berbenturan dengan asas hukum yang ada ?

Jawab : kita prioritaskan am saris, kasusnya lebih condong kemana. Kalo ke perpajakan ya pasti kita serahkan kepada yang ahli. Tapi jika korupsi kita yang tindak. Tetep bekerjasama mas aris.

7. Tindakan apa yang diterapkan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi di internal KPK sendiri ?

jawab : kita menjaga integritas kepada seluruh karyawan, kita tanamkan baik di kantor ataupun di lingkungan rumah kita. Dari hal yang terkecil. Agar terbiasa tidak berbuat curang.

8. Apakah bapak mendukung adanya kerja sama antara KPK dan DJP dalam menuntaskan kasus Korupsi ?

Jawab : oh tentu tentu saja, justru kerja sama kedua lembaga bakal memudahkan proses penanganan kasus korupsi. Kita sudah tanda tangani nota kesepahaman dengan DJP terkait penanganan kasus TIPIKOR. Jadi kami sangat mendukung adanya kerjasama kedua belah pihak. Tujuannya ya menyelesaikan kasus kasus korupsi dan mencegah masyarakat berbuat hal serupa.

9. Apa harapan bapak kedepan untuk lembaga KPK ?

Jawab : saya berharap KPK tetap kuat, sanggup melawan tekanan dari manapun terutama yang berbau politis. Karena kadang rekan di KPK sering sekali mendapat ancaman loh mas aris. Apalagi yang sedang menangani kasus korupsi besar. Saya sangat berharap masyarakat memberikan dukungan kepada KPK agar tetap terjaga integritas dan semangat anti korupsi di Indonesia tetap berkoabr mas.

